



**EVALUASI PENERAPAN E-GOVERNMENT DI PEMERINTAH
KABUPATEN SUMBAWA BESAR MENGGUNAKAN KERANGKA
KERJA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)**

SKRIPSI

Untuk memenuhi sebagian persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Komputer

Disusun oleh:
Hemy Dwi Pratiwi
NIM: 15515040111125



**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
JURUSAN SISTEM INFORMASI
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG**

2020

PENGESAHAN

EVALUASI PENERAPAN E-GOVERNMENT DI PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BESAR MENGGUNAKAN KERANGKA KERJA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Sarjana Komputer

Disusun Oleh :

Hemy Dwi Pratiwi

NIM: 155150401111125

Skripsi ini telah diuji dan dinyatakan lulus pada 20 Juli 2020

Telah diperiksa dan disetujui oleh:

Dosen Pembimbing I

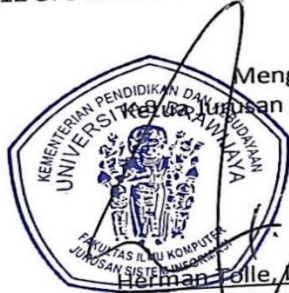
Dosen Pembimbing II

Digitally signed by Widhy H. N. Putra
DN: c=ID, ou=FILKOM, o=UB, cn=Widhy H. N. Putra,
E=widhy@ub.ac.id
Reason: I am approving this document
Date: 2020-08-26 16:23:12

Widhy Hayuhardhika Nugraha Putra,
S.Kom., M.Kom.
NIK: 201712 870409 2 001

Admaja Dwi Herlambang, S.Pd.
M.Pd
NIP: 198908022019031007

Mengetahui
Kebudayaan dan Sistem Informasi



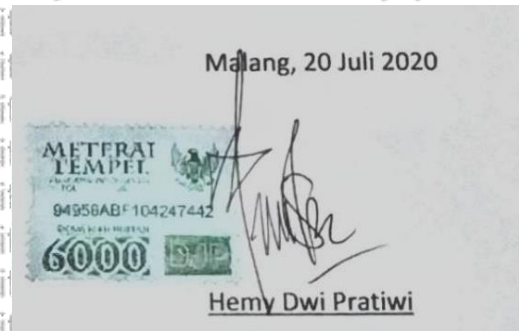
Herman Polle, Dr. Eng., S.T., M.T.
NIP: 19740823 200012 1 001



PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (sarjana) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).



NIM: 155150401111125



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan berkat, rahmat dan karunia, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Evaluasi Penerapan E-Government Di Pemerintah Kabupaten Sumbawa Besar Menggunakan Kerangka Kerja Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)” yang disusun sebagai bagian dari syarat memperoleh gelar Sarjana Komputer. Shalawat dan salam penulis curahkan kepada Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam beserta keluarga dan sahabat sahabatnya.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini ada banyak keterbatasan pengetahuan, kemampuan dan pemahaman penulis. Namun berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis dapat mengatasi keterbatasan tersebut. Karena itu, penulis ingin menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Wayan Firdaus Mahmudy, S.Si, M.T, Ph.D Selaku Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya.
2. Bapak Issa Arwani, S.kom., M.Sc. Selaku Ketua Jurusan Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya.
3. Bapak Yusi Tyroni Mursityo, S.Kom., M.AB Selaku Ketua Prodi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya, yang telah menyetujui penulis untuk melaksanakan penulisan skripsi.
4. Bapak Widhy Hayuhardhika Nugraha Putra, S.Kom., M.Kom Selaku pembimbing pertama dan Bapak Admaja Dwi Herlambang, S.Pd., M. Pd. Selaku pembimbing kedua yang telah menyediakan waktu dan tenaga serta dukungan dan motivasinya untuk membantu penulis dalam penyusunan skripsi.
5. Bapak Rahman Ansori, Bapak Rudi Yulianto, Ibu Baiq Rahmi Iryana, Bapak Heri Kusmanto, dan Bapak Dony Tri Wardana serta seluruh pegawai di Dinas Komunikasi dan Informatika yang telah membantu penulis dalam proses pengumpulan data untuk penyusunan skripsi ini.
6. Kedua orang tua penulis beserta kakak, adik, dan seluruh keluarga besar penulis yang senantiasa mendo’akan, menasehati dan membarikan dukungan baik moril dan materil selama proses pengerjaan skripsi berlangsung.
7. Teman-teman keluarga besar Sistem Informasi angkatan 2015, yang telah memotivasi dan memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Serta semua pihak yang terlibat yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.



Sebagai proses pembelajaran, tentunya skripsi ini tidak luput dari kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif penulis harapkan guna penyempurnaan yang lebih baik. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Malang, 20 Juli 2020

Hemy Dwi Pratiwi

Hemydwipratiwi05@gmail.com



ABSTRAK

Hemy Dwi Pratiwi, EVALUASI PENERAPAN E-GOVERNMENT DI PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BESAR MENGGUNAKAN KERANGKA KERJA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)

Dosen Pembimbing: Widhy Hayuhardhika Nugraha Putra, S.Kom., M.Kom., dan Admaja Dwi Herlambang, S.Pd., M.Pd.

Pemerintah Kabupaten Sumbawa, sebagai bagian dari instansi pemerintah Indonesia mulai melaksanakan perbaikan terhadap kinerja pemerintahannya sejalan dengan program reformansi birokrasi pemerintah, yaitu menata ulang, merubah, memperbaiki dan menyempurnakan birokrasi agar menjadi lebih efisien, efektif, dan produktif. Namun, pada hasil penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), selama 2 tahun (2017-2018) berturut-turut Kabupaten Sumbawa meraih predikat "CC" di Provinsi Nusa Tenggara Barat. konsep E-government adalah menciptakan interaksi yang ramah, nyaman, transparan dan murah antara lembaga pemerintah dan masyarakat (Government to Citizen), lembaga pemerintah dan pemerintah bisnis (Government to Business Enterprises) dan hubungan antar lembaga pemerintah (Government to Government). Maka dari itu pemanfaatan penerapan e-government juga diharapkan dapat memperbaiki produktifitas dan efensiensi birokrasi serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Penelitian ini bertujuan untuk menilai penerapan e-government menggunakan kerangka kerja SPBE pada dimensi layanan SPBE di Kabupaten Sumbawa. Metodologi penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data menggunakan wawancara, dan observasi. Berdasarkan hasil analisis penerapan e-government pada dimensi layanan SPBE di Kabupaten Sumbawa berada pada predikat "baik" dengan nilai rata-rata 2,80 pada setiap indikator. Dari hasil penelitian tersebut kemudian disusun rekomendasi perbaikan untuk penerapan e-government berdasarkan pada setiap indikator dalam layanan SPBE untuk mencapai predikat "memuaskan" berdasarkan kerangka kerja SPBE.

Kata kunci: e-government, SPBE, Pemerintah Kabupaten Sumbawa



ABSTRACT

Hemy Dwi Pratiwi, EVALUATION OF E-GOVERNMENT IMPLEMENTATION IN THE SUMBAWA BESAR GOVERNMENT USING ELECTRONIC GOVERNMENT SYSTEM (SPBE) FRAMEWORK

Supervisor : Widhy Hayuhardhika Nugraha Putra, S.Kom., M.Kom., dan Admaja Dwi Herlambang, S.Pd., M.Pd.

The Sumbawa Regency Government, as part of the Indonesian government agency, has begun to carry out improvements to the performance of its government in line with the government's bureaucratic reform program, which is to reorganize, change, improve and perfect the bureaucracy to become more efficient, effective and productive. However, on the results of the Government Institution Performance Accountability Assessment System (SAKIP), for 2 years (2017-2018), Sumbawa Regency get the "CC" title in West Nusa Tenggara Province. E-government concept is to create friendly, convenient, transparent and inexpensive interactions between government and community institutions (Government to Citizen), government agencies and business government (Government to Business Enterprises) and relationships between government agencies (Government to Government). Therefore the use of e-government application is also expected to improve the productivity and efficiency of the bureaucracy and increase economic growth.

This study aims to assess the application of e-government using the SPBE framework on the SPBE service dimension in Sumbawa Regency. The research methodology used is descriptive qualitative data collection using interviews, and observation. Based on the results of the analysis, the application of e-government in the SPBE service dimension in Sumbawa Regency is in the category of "good" with an average value of 2.80 on each indicator. From the results of the study, recommendations for improving the implementation of e-government are then based on each indicator in the SPBE service to achieve the "satisfactory" rating based on the SPBE framework.

Keywords: *e-government, SPBE, Sumbawa Regency Government*



DAFTAR ISI

PENGESAHAN	i
PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan	4
1.4 Manfaat	4
1.5 Batasan Masalah	4
1.6 Sistematika Pembahasan	5
BAB 2 LANDASAN KEPUSTAKAAN	6
2.1 Kajian Pustaka	6
2.1.1 Evaluasi Penerapan <i>E-GOVERNMENT</i> di Pemerintah Kota Batu Menggunakan Kerangka Kerja Pemeringkatan <i>E-GOVERNMENT</i> Indonesia (PEGI)	6
2.1.2 Tatakelola Pemerintahan Berbasis Electronic Government di Kabupaten Semarang	7
2.1.3 Evaluasi Tingkat Kesiapan Pemerintah Kota Batu Dalam Menerapkan Pemerintahan Berbasis Elektronik (<i>E-GOVERNMENT</i>) Dengan Menggunakan ICT Readiness	8
2.2 <i>E-Government</i>	9
2.2.1 Definisi E-Government	9
2.2.2 Model E-Government	10
2.2.3 Kebijakan E-Government Nasional	10
2.3 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	11



2.3.1 Tujuan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).....	11
2.3.2 Domain Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik.....	12
2.4 Profil Kabupaten Sumbawa.....	15
2.4.1 Demografi Kabupaten Sumbawa.....	15
2.4.2 Visi dan Misi Kabupaten Sumbawa.....	15
2.5 Subyek Penelitian.....	17
2.5.1 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa.....	17
2.6 Populasi dan Sampel Penelitian Kualitatif.....	19
BAB 3 METODOLOGI.....	21
3.1 Pendekatan Penelitian.....	21
3.2 Studi Literatur dan Observasi.....	22
3.2.1 Analisis Kebutuhan.....	22
3.2.2 Subyek dan Obyek Penelitian.....	22
3.3 Pengumpulan Data.....	22
3.3.1 Observasi.....	22
3.3.2 Wawancara.....	22
3.3.3 Konfirmasi Data.....	23
3.4 Bobot Domain dan Aspek.....	23
3.5 Sistem Penilaian Kerangka Kerja Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).....	24
3.5.1 Indeks Penilaian SPBE.....	25
3.6 Tingkat Kematangan Kapabilitas pada Kerangka Kerja Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE).....	25
3.6.1 Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses.....	25
3.6.2 Tingkat Kematangan Kapabilitas Fungsi.....	28
3.7 Analisis dan Pengolahan Data.....	30
3.7.1 Penilaian Penerapan <i>E-government</i> di SOPD Terkait.....	30
3.7.2 Pembuatan Rekomendasi.....	30
3.8 Kesimpulan.....	30



BAB 4 HASIL DAN ANALISIS	31
4.1 Penilaian Domain Layanan SPBE	31
4.2 Aspek 6 Layanan Administrasi Pemerintah Berbasis Elektronik.....	31
4.2.1 Layanan Naskah Dinas	31
4.2.2 Layanan Manajemen Kepegawaian	32
4.2.3 Layanan Manajemen Perencanaan	34
4.2.4 Layanan Manajemen Penganggaran.....	35
4.2.5 Layanan Manajemen Keuangan.....	36
4.2.6 Layanan Manajemen Kinerja	37
4.2.7 Layanan Pengadaan.....	38
4.3 Hasil Penilaian Aspek 6 pada Domain Layanan SPBE	40
BAB 5 PEMBAHASAN.....	42
5.1 Indikator 25 Layanan Naskah Dinas	42
5.2 Indikator 26 Layanan Manajemen Kepegawaian.....	44
5.3 Indikator 27 Layanan Manajemen Perencanaan	45
5.4 Indikator 28 Layanan Manajemen Penganggaran	47
5.5 Indikator 29 Layanan Manajemen Keuangan	48
5.6 Indikator 30 Layanan Manajemen Kinerja	49
5.7 Indikator 31 Layanan Pengadaan.....	51
BAB 6 PENUTUP	53
6.1 Kesimpulan.....	53
6.2 Saran	53
DAFTAR PUSTAKA.....	54
LAMPIRAN	56

**DAFTAR TABEL**

Tabel 3.1 Bobot Domain dan Aspek.....	23
Tabel 3.2 Tabel Domain, Aspek, dan Indikator SPBE.....	24
Tabel 3.3 Kelompok Nilai Dalam SPBE.....	25
Tabel 3.4 Tingkat Kematangan pada Domain Tata Kelola SPBE dan Kebijakan Internal SPBE.....	26
Tabel 3.5 Tingkat Kematangan pada Domain Layanan SPBE.....	28
Tabel 4.1 Penilaian Indikator Layanan Naskah Dinas.....	31
Tabel 4.2 Penilaian Indikator Layanan Manajemen Kepegawaian.....	33
Tabel 4.3 Penilaian Indikator Layanan Manajemen Perencanaan.....	34
Tabel 4.4 Penilaian Indikator Layanan Manajemen Penganggaran.....	35
Tabel 4.5 Penilaian Indikator Layanan Manajemen Keuangan.....	36
Tabel 4.6 Penilaian Indikator Layanan Manajemen Kinerja.....	37
Tabel 4.7 Penilaian Indikator Layanan Pengadaan.....	39
Tabel 4.8 Penilaian Aspek 6 pada Layanan SPBE yang Diteliti.....	41
Tabel 5.1 Rekomendasi Target pada Layanan Naskah Dinas.....	43
Tabel 5.2 Rekomendasi Target pada Layanan Manajemen Kepegawaian.....	45
Tabel 5.3 Rekomendasi Target pada Layanan Manajemen Perencanaan.....	46
Tabel 5.4 Rekomendasi Target pada Layanan Manajemen Penganggaran.....	47
Tabel 5.5 Rekomendasi Target pada Layanan Manajemen Keuangan.....	49
Tabel 5.6 Rekomendasi Target pada Layanan Manajemen Kinerja.....	50
Tabel 5.7 Rekomendasi Target pada Layanan Pengadaan.....	51



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Kominfo Kabupaten Sumbawa.....	19
Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian.....	21
Gambar 4.1 Grafik Penilaian Aspek 6 pada Domain Layanan SPBE.....	40



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN B HASIL WAWANCARA DATA INDIKATOR 25 LAYANAN NASKAH DINAS PADA ASPEK 6 SPBE.....	56
LAMPIRAN F SCREENSHOT LAYANAN NASKAH DINAS.....	58
LAMPIRAN E HASIL WAWANCARA DATA INDIKATOR 26 LAYANAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN PADA ASPEK 6 SPBE.....	59
LAMPIRAN G LAYANAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN.....	61
LAMPIRAN I HASIL WAWANCARA DATA INDIKATOR 27 LAYANAN MANAJEMEN PERENCANAAN PADA ASPEK 6 SPBE.....	62
LAMPIRAN J LAYANAN MANAJEMEN PERENCANAAN.....	64
LAMPIRAN L HASIL WAWANCARA DATA INDIKATOR 28 LAYANAN MANAJEMEN PENGANGGARAN PADA ASPEK 6 SPBE.....	65
LAMPIRAN M LAYANAN MANAJEMEN PENGANGGARAN.....	67
LAMPIRAN O HASIL WAWANCARA DATA INDIKATOR 29 LAYANAN MANAJEMEN KEUANGAN PADA ASPEK 6 SPBE.....	68
LAMPIRAN P LAYANAN MANAJEMEN KEUANGAN.....	70
LAMPIRAN R HASIL WAWANCARA DATA INDIKATOR 30 LAYANAN MANAJEMEN KINERJA PADA ASPEK 6 SPBE.....	71
LAMPIRAN S LAYANAN MANAJEMEN KINERJA.....	73
LAMPIRAN U HASIL WAWANCARA DATA INDIKATOR 31 LAYANAN PENGADAAN PADA ASPEK 6 SPBE.....	74
LAMPIRAN V LAYANAN PENGADAAN.....	76
LAMPIRAN A HASIL EVALUASI LAYANAN SPBE INDIKATOR 25 LAYANAN NASKAH DINAS.....	77
LAMPIRAN D HASIL EVALUASI LAYANAN SPBE INDIKATOR 26 LAYANAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN.....	80
LAMPIRAN H HASIL EVALUASI LAYANAN SPBE INDIKATOR 27 LAYANAN MANAJEMEN PERENCANAAN.....	83
LAMPIRAN K HASIL EVALUASI LAYANAN SPBE INDIKATOR 28 LAYANAN MANAJEMEN PENGANGGARAN.....	86
LAMPIRAN N HASIL EVALUASI LAYANAN SPBE INDIKATOR 29 LAYANAN MANAJEMEN KEUANGAN.....	89



LAMPIRAN Q HASIL EVALUASI LAYANAN SPBE INDIKATOR 30 LAYANAN
MANAJEMEN KINERJA 92

LAMPIRAN T HASIL EVALUASI LAYANAN SPBE INDIKATOR 31 LAYANAN
PENGADAAN 95



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pemerintah Kabupaten Sumbawa yang merupakan salah satu instansi pemerintah Indonesia memulai proses untuk memperbaiki kinerja instansi pemerintahannya. Sesuai dengan program reformansi birokrasi pemerintah, yaitu menata ulang, merubah, memperbaiki dan melakukan penyempurnaan birokrasi dengan tujuan menjadi lebih baik. Pemerintah Kabupaten Sumbawa sendiri pada hasil penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) selama 2 tahun (2017-2018) Kabupaten Sumbawa meraih predikat "CC" di Provinsi Nusa Tenggara Barat. SAKIP merupakan salah satu indikator penilaian kinerja SPBE daerah. Pada setiap tahun Menpan RB selalu melakukan evaluasi atau penilaian terhadap implementasi SAKIP. SAKIP sendiri adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja instansi/unit kerja pemerintah.

Melalui SAKIP, Menpan RB mampu melihat konsistensi pemerintah daerah dalam integrasi sistem perencanaan, penggaran, dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan sistem akuntabilitas keuangan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden No. 29 tahun 2014. Hasil ini menunjukkan bahwa kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Sumbawa belum berjalan maksimal karena koordinasi antara elemen pemerintah yang kurang baik dan ketidaksesuaian agenda dinas daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang sudah disusun serta penataan anggaran kegiatan pemerintahan yang tidak detail. Hal tersebut mendorong Pemerintah Kabupaten Sumbawa untuk segera memperbaiki proses kinerja pemerintahannya, dengan cara memperbaiki proses penerapan e-government pada setiap Struktur Organisasi Perangkat daerah (SOPD) di Kabupaten Sumbawa. Hal ini diharapkan bisa membantu proses kegiatan instansi pemerintahan agar lebih maksimal secara menyeluruh.

E-government itu sendiri adalah suatu implementasi dari serangkaian proses bisnis dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk memungkinkan kelancaran pelaksanaan sektor pemerintah yang efisien dan murah, dengan meningkatkan pelayanan masyarakat dengan cara menyediakan sarana publik sehingga seluruh lapisan masyarakat mudah mendapatkan informasi dan menciptakan pemerintahan (Caldow, disitasi Indarajit, 2006).

Pemanfaatan penerapan *e-government* diharapkan dapat memperbaiki produktifitas dan efisiensi birokrasi pemerintah serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Konsep *e-government* itu sendiri adalah menciptakan interaksi yang ramah, nyaman, transparan dan murah antara lembaga pemerintah dan masyarakat



(Government to Citizen), lembaga pemerintah dan pemerintah bisnis (Government to Business Enterprises) dan hubungan antar lembaga pemerintah (Inter Agency Relationship).

Penyelenggaraan *e-government* merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah daerah yang sesuai dengan perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara dimana selain adanya perubahan sistem pemerintahan yang otoriter dan sentralistik menjadi sistem pemerintahan yang demokratis, yang dimana juga telah di terapkannya pada otonomi daerah. Pengimplementasian *e-government* yang dilakukan pemerintah sudah dimulai sejak dikeluarkan instruksi berdasarkan INPRES (Instruksi Presiden) No. 3 Tahun 2003, Menteri Komunikasi dan Informasi mendorong pemanfaatan teknologi informasi untuk instansi pemerintah pusat dan instansi pemerintah daerah.

Pengembangan *e-government* adalah salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam menciptakan pemerintahan yang terbuka untuk memaksimalkan penggunaan teknologi informasi. Penyelenggaraan *e-government* dimulai dengan keluarnya Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2001, tentang pengembangan dan penggunaan teknologi komunikasi, media, dan informatika yang menginstruksikan seluruh instansi pemerintahan harus menggunakan teknologi informasi untuk setiap kegiatan pemerintahannya.

Rencana mengenai reformasi birokrasi dirancang oleh pemerintah dengan mengeluarkan peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) No.11 tahun 2010. Yang menyebutkan mengenai persyaratan dan ukuran keberhasilan dari Reformasi Birokrasi, yang mana indikator dari kesuksesan reformasi birokrasi adalah terciptanya *e-government* pada setiap lembaga pemerintahan pusat dan daerah, dengan tujuan menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan proses yang distandarisasi oleh penyelenggara pemerintah.

Untuk mendukung hal tersebut, melalui Perpres 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 Oktober 2018 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dibentuk. SPBE sendiri merupakan suatu kerangka kerja yang memiliki tujuan untuk menciptakan proses kerja yang efisien dan efektif dalam lingkup instansi pemerintahan pusat dan daerah. Untuk memaksimalkan penerapan SPBE pada instansi pemerintah pusat atau daerah, perlu dilakukan suatu proses evaluasi dari penerapan SPBE tersebut.

Penerapan *e-government* dan SPBE pada lembaga pemerintahan di Kabupaten Sumbawa diperlukan untuk mengetahui sejauh mana tingkatan dari penerapan teknologi informasi dan komunikasi yang telah dilakukan. Pada penelitian ini, penilaian dilakukan pada Dinas Komunikasi dan Informatika (DisKominfo) Kabupaten



Sumbawa. Dinas Komunikasi dan Informatika dipilih karena dinas ini menjadi *leader sector* dalam penerapan teknologi informasi Kabupaten Sumbawa.

Maka dari itu, penilaian dalam penelitian kali ini dilakukan menggunakan kerangka kerja Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tepat pada 7 indikator yang berada dalam aspek 6 mengenai layanan administrasi berbasis elektronik di domain 3 tentang layanan SPBE yang diatur dan diorganisir oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (KEMENPAN RB). Domain 3 dipilih sebagai domain penelitian karena memiliki bobot presentase penilaian yang lebih besar dibanding dengan domain dan aspek lainnya, penelitian ini juga berfokus pada Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik yang sejalan dengan tindakan pemerintah kabupaten sumbawa dalam hasil evaluasi SAKIP pada pemerintahan Kabupaten Sumbawa. Untuk domain 1 mengenai Kebijakan Internal SPBE, dan domain 2 mengenai tatakelola SPBE diperlukan pengukuran atau penilaian dengan Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses dimana hal tersebut dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.

Evaluasi yang akan dilakukan merupakan bentuk dari penelitian yang diharapkan dapat menjawab hasil dari evaluasi yang telah dilakukan sebelumnya oleh SAKIP pada pemerintah Kabupaten Sumbawa yang mendapatkan hasil CC, dimana hal tersebut menunjukkan kurangnya penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten Sumbawa. Sesuai dengan Instruksi Presiden No.3 Tahun 2003 yang berisi tentang Kebijakan dan Strategi Nasional dalam Pengembangan *e-government*, upaya penyelenggaraan pemerintah untuk pemanfaatan *e-government* harus dalam lingkup pelayanan publik yang efektif dan efisien. dengan evaluasi SPBE diharapkan penerapan dan pemberdayaan teknologi dalam bidang pemerintahan juga menjadi lebih baik guna mendukung seluruh aspek *e-government* yang dicanangkan oleh pemerintah.

Pada umumnya, untuk mengevaluasi penerapan dari suatu kerangka kerja dapat digunakan beberapa metode seperti PeGI atau cobit, namun kedua metode tersebut memiliki indikator penilaian yang kurang relevan dibandingkan dengan metode evaluasi SPBE sendiri, maka dari itu kerangka kerja ini dipilih karena kerangka kerja SPBE adalah sekumpulan proses penilaian dari proses kegiatan SPBE pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang nantinya akan menunjukkan data mengenai nilai yang dapat direpresentasikan sebagai nilai *maturity level* atau tingkat kematangan dari proses pelaksanaan SPBE di Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Tujuan dari pembentukan SPBE sendiri adalah untuk mengetahui pencapaian pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintahan Daerah serta memberikan saran perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan SPBE dan menjamin kualitas pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.



1.2 Rumusan masalah

1. Bagaimana hasil penilaian penerapan *e-government* menggunakan kerangka kerja SPBE pada aspek layanan SPBE di Kabupaten Sumbawa?
2. Bagaimana hasil penilaian penerapan *e-government* menggunakan kerangka kerja SPBE pada setiap indikator pada layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik di Kabupaten Sumbawa?
3. Bagaimana rekomendasi perbaikan untuk setiap penilaian penerapan *e-government* dalam SPBE di Kominfo Kabupaten Sumbawa?

1.3 Tujuan

1. Mengetahui hasil penilaian penerapan *e-government* menggunakan kerangka kerja SPBE pada dimensi Layanan SPBE di Kabupaten Sumbawa.
2. Mengetahui hasil penilaian penerapan *e-government* menggunakan kerangka kerja SPBE pada layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik di Kabupaten Sumbawa.
3. Mengetahui hasil penilaian penerapan *e-government* menggunakan kerangka kerja SPBE pada setiap indikator pada layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik di Kabupaten Sumbawa.
4. Menyusun rekomendasi perbaikan berdasarkan penilaian yang telah dilakukan berdasarkan kerangka kerja SPBE.

1.4 Manfaat

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah dapat memberikan hasil penilaian dan analisa yang telah dilakukan dalam proses evaluasi penerapan *e-government* pada instansi Pemerintah Kabupaten Sumbawa. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam melakukan pengembangan mengenai pengimplementasian *e-government* di Pemerintah Kabupaten Sumbawa.

1.5 Batasan masalah

1. Penerapan *e-government* di lingkungan Kabupaten Sumbawa Besar yang di koordinasi oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sumbawa.
2. Penilaian menggunakan kerangka kerja Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Domain Layanan SPBE di Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik.
3. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah studi literatur, kuisisioner, wawancara dan observasi.



4. Hasil penilaian berupa rekomendasi akademis yang penerapannya diserahkan kembali ke Dinas Kominfo Kabupaten Sumbawa.

1.6 Sistematika pembahasan

Penelitian ini dilakukan dengan 6 (enam) bab. Enam bab tersebut meliputi pendahuluan, landasan kepastakaan, metodologi, hasil dan analisis, pembahasan dan kesimpulan.

BAB 1 PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, tujuan, rumusan masalah, batasan masalah dan manfaat penelitian mengenai Evaluasi Penerapan *e-government* di Pemerintah Kabupaten Sumbawa dengan kerangka kerja Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

BAB 2 LANDASAN KEPUSTAKAAN

Berisi tinjauan pustaka dari buku, jurnal, artikel, website, peraturan, dan penelitian sebelumnya yang dapat menjadi acuan dalam penelitian ini.

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN

Berisi langkah langkah pengerjaan penelitian, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB 4 HASIL DAN ANALISIS

Memaparkan hasil dan analisis yang didapatkan dari evaluasi yang telah dilakukan terhadap Dinas Kominfo Kabupaten Sumbawa menggunakan kerangka kerja Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

BAB 5 PEMBAHASAN

Berisi penyusunan rekomendasi perbaikan penerapan *e-government* berdasarkan kerangka kerja Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

BAB 6 KESIMPULAN

Berisi rangkuman keseluruhan penelitian dari awal sampai akhir, beserta saran untuk pengembangan penelitian kedepan.



BAB 2 LANDASAN KEPUSTAKAAN

2.1 Kajian Pustaka

Dalam Kajian Pustaka, akan disampaikan penelitian-penelitian terdahulu mengenai implementasi dari *e-government*. Dimana hal tersebut merupakan inti dari penelitian kali ini. Melakukan Kajian Pustaka sendiri dapat menciptakan pemikiran yang lebih sistematis yang nantinya dapat digunakan sebagai tolak ukur dalam melakukan penelitian.

2.1.1 EVALUASI PENERAPAN *E-GOVERNMENT* DI PEMERINTAH KOTA BATU MENGGUNAKAN KERANGKA KERJA PEMERINGKATAN *E-GOVERNMENT* INDONESIA (PEGI).

Judul	Penulis	Metode	Hasil/kesimpulan
Evaluasi Penerapan <i>E-Government</i> di Pemerintah Kota Batu Menggunakan Kerangka Kerja Pemerinkkatan <i>E-Government</i> Indonesia (PEGI).	Rido Fadlurrahman	Kualitatif Deskriptif	Rido Fadlurrahman melakukan evaluasi terhadap penerapan <i>e-government</i> di Lingkungan pemerintah kota batu menggunakan kerangka kerja PEGI. Beliau melakukan Penelitian tersebut dikarenakan pada 2 tahun sebelumnya (2016-2017) Kota Batu mendapatkan peringkat terakhir dari total 38 kota diprovinsi jawa timur. Dari hasil penelitian 3 SOPD pemerintah Kota batu dinas Kominfo, bapelitbangda, dan dinas Pertanian didapatkan hasil baik, kurang, dan kurang. Dari Sini ridho sendiri dapat membuat rekomendasi untuk Peningkatan penerapan <i>e-government</i> di kota batu.



2.1.2 TATAKELOLA PEMERINTAHAN BERBASIS ELECTRONIC GOVERNMENT DI KABUPATEN SEMARANG.

Judul	Penulis	Metode	Hasil/kesimpulan
Tatakelola Pemerintahan Berbasis Electronic Government di Kabipaten Semarang.	Firman Bimasakti	Kualitatif Deskriptif	Firman Bimasakti melakukan Penelitian terhadap tatakelola Pemerintahan yang berbasis electronic government di Kabupaten Semarang dikarenakan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 mengenai Tingkat akuntabilitas dari instansi pemerintah yang bertujuan untuk mencapai Good Governance di Indonesia. Fokus penelitian beliau Adalah tata kelola pemerintahan yang berbasis elektronik government, dan didapati hasil bahwa dari tata kelola kedua dinas Tersebut belum bisa terlaksana secara optimal.



2.1.3 EVALUASI TINGKAT KESIAPAN PEMERINTAH KOTA BATU DALAM MENERAPKAN PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (E-GOVERNMENT) DENGAN MENGGUNAKAN ICT READINESS

Judul	Penulis	Metode	Hasil/kesimpulan
Evaluasi tingkat kesiapan pemerintah kota batu dalam menerapkan pemerintahan berbasis elektronik (E-Government) dengan menggunakan ICT Readiness.	Ratna Dwi Anjani, Suprpto, dan Atmaja Dwi Herlambang	Kualitatif Deskriptif	Ratna Dwi Anjani, Dkk, melakukan Penelitian mengenai tingkat kesiapan pemerintah kota batu dalam menerapkan pemerintahan berbasis elektronik (E-Government) menggunakan ICT Readiness. Beliau melakukan penelitian ini karena pada tahun 2018 Pemerintah Kota Batu akan membuat ICT Road Map. hal tersebut disusun untuk pengembangan TIK pada Pemerintah Kota Batu periode 2018-2022. Hasil dari ICT Road Map dapat dijadikan acuan dalam perencanaan implementasi TIK di Pemerintah Kota Batu. Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan e- government di Pemerintahan Kota Batu masih memiliki kendala yang perlu dilakukan evaluasi.



2.2 E-Government

2.2.1 Definisi E-Government

e-government merupakan konsep yang pertama kali muncul pada tahun 1993 di Amerika. Sejalan dengan berkembangannya konsep *governance* dan perkembangan TIK berkembang pula konsep *e-Governance*, seiring dengan itu pula konsep *e-government* dan *e-governance* menjadi tumpang tindih. *e-Governance* seringkali didefinisikan sangat sederhana yaitu bagaimana pemerintah menggunakan TIK untuk meningkatkan efisien terutama pada pelayanan publik. Mulai dari saat itu, penerapan *e-government* selalu menjadi tujuan pemerintahan baik oleh negara berkembang maupun negara maju. Penggunaan *e-government* yang memanfaatkan teknologi informasi dan internet

untuk melakukan pelayanan publik, bisnis, dan pemerintahan dilakukan selama 24 jam dalam 7 hari penuh (Alhomod dkk, 2012).

Menurut Bruno Lanvin, dalam buku yang dia tulis dengan judul *The E-government Handbook for Developing Country, e-government* diartikan sebagai perkembangan dalam penggunaan teknologi informasi yang dapat memperbaiki kinerja pemerintah menjadi lebih baik. Hal itu ditunjukkan dengan semakin mudahnya informasi mengenai pemerintahan diakses melalui teknologi informasi, lebih efektif dalam membuat peraturan, dan lebih bertanggung jawab dalam menjalankan fungsi pemerintahannya.

Sesuai dengan Instruksi Presiden No.3 Tahun 2003 yang berisi tentang Kebijakan dan Strategi Nasional dalam Pengembangan *e-government*, upaya penyelenggaraan pemerintah untuk pemanfaatan *e-government* harus dalam lingkup pelayanan publik yang efektif dan efisien. Aktivitas dalam pemanfaatan *e-government* tersebut harus mencakup 2 aktivitas yaitu pengolahan, pengelolaan, dan manajemen proses kerja, dan kedua adalah peningkatan teknologi informasi untuk pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah dan murah disemua wilayah pemerintahan.

Dari beberapa pengertian mengenai *e-government* diatas, bisa ditarik kesimpulan bahwa untuk mendukung penerapan dari teknologi informasi yang efektif dan efisien diperlukan implementasi *e-government* yang baik pula. Penerapan dari *e-government* ini dapat ditingkatkan transparansi pemerintahan serta dapat memberdayakan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan sehingga proses pemerintahan dapat berjalan dengan adil dan demokratis (Hernikawati, 2013).



2.2.2 Model E-Government

E-government dapat meningkatkan ikatan antara pemerintah dengan pihak yang memiliki keterikatan dengannya. Pemanfaatan teknologi informasi dapat mengembangkan bentuk hubungan baru dalam *e-government* seperti (Sutabri, 2012):

2.2.2.1 G2C (Government to Citizen)

Bentuk G2C adalah salah satu dari bentuk hubungan layanan yang tercipta karena adanya penerapan *e-government*. G2C atau yang dimaksud dengan Government to Citizen adalah suatu bentuk pelayanan dari pemerintah berupa informasi dan pelayanan publik yang dilakukan dengan baik dan benar. Pelayanan pemerintah dalam hal ini juga memberikan izin akses kepada masyarakat akan informasi yang ingin mereka dapatkan dengan sistem portal online. Portal online ini juga dapat berfungsi untuk pemberian perizinan dan juga sertifikat serta dapat dijadikan salah satu sarana pemerintah dalam meminta pendapat publik hingga pemungutan suara elektronik atau *e-vote*.

2.2.2.2 G2B (Government to Business)

G2B atau Government to Business merupakan salah satu hubungan yang timbul dari penerapan *e-government* pada instansi pemerintahan. Hubungan ini memberikan layanan yang dapat digambarkan seperti *one-stop single-window service*, dimana layanan yang berada dalam hubungan ini meliputi urusan administrasi, informasi mengenai industri, dan layanan transaksi elektronik.

2.2.2.3 G2G (Government to Government)

G2G atau Government to Government merupakan salah satu hubungan yang terjadi ketika *e-government* diimplementasikan pada instansi pemerintahan. Government to Government sendiri memiliki tujuan untuk membangun kesetaraan antar instansi pemerintah pusat dan instansi pemerintah daerah, kesetaraan yang dimaksud dapat dicapai dengan adanya sistem pelaporan yang saling terhubung antara instansi pemerintah pusat dan daerah sehingga dapat meningkatkan akurasi dalam pertukaran informasi, dan sumber daya.

2.2.3 Kebijakan E-Government Nasional

Kebijakan pada implementasi *e-government* secara nasional sudah ada mulai dari tahun 2003 dimana saat itu Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Instruksi Presiden No.3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional dalam pengembangan *e-government*, sudah dijelaskan sebelumnya bahwa pengimplementasian *e-government* bertujuan untuk memaksimalkan penggunaan teknologi informasi dan informatika yang ada sehingga proses pemerintahan dan kinerja kepegawaian dapat berjalan jauh lebih efisien dan efektif.



Penerapan *e-government* pada setiap instansi pemerintahan juga dapat membuat suatu data sentral yang terpadu dimana data tersebut akan menunjang peran dari pemerintah daerah dalam meningkatkan sumber daya dan informasi yang dimiliki. Hal tersebut dapat berpengaruh besar dalam kesetaraan daya saing instansi pemerintah pusat dan daerah. Hal tersebut juga mendukung kemudahan dalam penyebaran informasi yang dapat diakses oleh masyarakat lebih cepat dan lebih mudah.

2.3 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan suatu kerangka kerja yang memiliki tujuan untuk menciptakan proses kerja yang efisien dan efektif dalam lingkup instansi pemerintahan pusat dan daerah. Agar pelaksanaan kerangka kerja SPBE dapat selalu berjalan maksimal, dibutuhkan proses evaluasi yang dilakukan secara berkala. Proses evaluasi pada kerangka kerja SPBE ini merupakan suatu rangkaian proses penilaian terhadap setiap bidang pelaksanaan SPBE baik di instansi pemerintah pusat dan daerah yang nantinya akan digambarkan dalam tabel tingkat kematangan (*maturity level*) dari pelaksanaan kerangka kerja SPBE tersebut.

Untuk menjamin proses dari evaluasi kerangka kerja SPBE selalu memberikan hasil yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas implementasi kerangka kerja SPBE, disusun pedoman atau pengarahannya mengenai pelaksanaan evaluasi SPBE. Pedoman evaluasi ini disusun untuk mengatur 3 alur dasar dalam evaluasi kerangka kerja SPBE seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Dalam satu proses evaluasi, ruang lingkup yang harus terpenuhi sedikitnya mencakup tata kelola SPBE, Layanan SPBE, dan Kebijakan SPBE.

2.3.1 Tujuan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan kerangka kerja penilaian yang memiliki 3 tujuan utama. Yaitu:

1. Mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dalam rangka mencapai proses kerja yang efisien dan efektif dalam segi pelayanan publik, implementasi SPBE perlu dilakukan secara berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan yang telah dicapai dari setiap proses SPBE yang sudah dilakukan.

2. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE.

Dengan adanya proses evaluasi terhadap proses SPBE yang dilakukan secara berkala, dapat dikumpulkan data mengenai capaian SPBE melalui proses wawancara dan observasi. Dari hasil data yang terkumpul lalu akan dilakukan proses analisis untuk mengukur kemajuan dalam proses SPBE dan selanjutnya



dapat dilaporkan kepada pihak yang bertanggung jawab (pemegang wewenang) untuk mendapatkan saran atau rekomendasi perbaikan untuk lebih mengoptimalkan proses SPBE pada instansi pemerintah pusat dan daerah.

3. Menjamin kualitas pelaksanaan evaluasi SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Proses untuk menjamin kualitas dari pelaksanaan evaluasi SPBE dapat dilakukan dengan lebih mudah berkat adanya tim evaluator SPBE internal yang berfungsi untuk mengatur proses evaluasi SPBE secara keseluruhan. Tim evaluator Internal ini juga mempunyai tanggung jawab untuk memberikan hasil dari evaluasi kepada pemegang kepentingan untuk dilakukan perbaikan sehingga capaian proses SPBE lebih efektif dan efisien.

2.3.2 Domain Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik

Dalam kerangka kerja Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) terdapat dimensi *e-government*; kebijakan internal, Tata Kelola SPBE, dan Layanan SPBE. Penjelasan mengenai setiap dimensinya dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Domain Kebijakan Internal SPBE

Domain Kebijakan Internal SPBE merupakan domain yang menjadi landasan utama dalam pengembangan dari implementasi *e-government*, hal tersebut didukung dengan adanya dukungan dari pimpinan di instansi pemerintah terkait. Domain kebijakan internal SPBE sendiri dapat dibedakan menjadi dua yaitu, kebijakan publik dan kebijakan privat yang masing-masing kebijakan memiliki keterikatan yang berbeda. Pada kebijakan publik lebih digolongkan dalam kebijakan yang dibuat oleh lembaga pemerintah dan bersifat mempengaruhi masyarakat. Sedangkan pada kebijakan privat lebih merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga instansi internal namun tidak bersifat mengikat (Simatupang, 2003).

Dalam SPBE sendiri, Internal adalah seseorang yang memiliki tugas untuk memantau proses implementasi dari kebijakan dan prosedur yang sudah ada pada setiap instansi pemerintahan, dan melakukan penilaian akan tingkat implementasian tersebut yang nantinya Internal akan membantu instansi pemerintahan tersebut dalam mencapai tujuannya menggunakan rekomendasi dari nilai yang sudah didapatkan sebelumnya.

2. Domain Tata Kelola SPBE

Tata keola merupakan seperangkat tata hubungan diantara manajemen perseroan, direksi, komisaris, dan para pemangku kepentingan lainnya (OECD, 2004). Tata kelola bisa juga dilihat sebagai proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan pemerintah, dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemerintahan



dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders yang lain (IICG, 2015).

Pengertian tata kelola bisa ditemukan dalam berbagai penjelasan. Tetapi pada dasarnya tata kelola berfokus pada bagaimana cara semua pihak didalam organisasi termasuk stakeholders untuk memastikan manajer dan individu lainnya yang ada dalam organisasi untuk selalu memiliki alat ukur yang jelas atau mengadaptasi mekanisme untuk menjaga ketertarikan dari stakeholder (Waseem, 2011). Selain itu tata kelola secara sederhana dilihat sebagai prosedur dan proses yang sesuai dengan arahan dan kontrol dari masing-masing pemerintah (OECD, 2004).

Tata kelola merupakan seperangkat tata hubungan diantara manajemen perseroan, direksi, komisaris, dan para pemangku kepentingan lainnya (OECD, 2004).

Tata kelola pemerintah bisa juga dilihat sebagai proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan pemerintah, dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemerintahan dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders yang lain (IICG, 2015).

Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara menekankan kewajiban bagi BUMN untuk menerapkan GCG secara konsisten dan atau menjadikan prinsip-prinsip GCG sebagai landasan operasionalnya, yang pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas pemerintah guna mewujudkan nilai pemerintahan dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya, dan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika. Sementara itu BPKP (2015) mendefinisikan tata kelola melalui soft definition yang mudah dicerna, sekalipun oleh orang awam, yaitu: "komitmen, aturan main, serta praktik penyelenggaraan bisnis secara sehat dan beretika".

Sekarang ini tata kelola pemerintah yang baik lebih dikenal sebagai suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness) (Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum). Hampir seluruh pemerintah menggunakan prinsip ini sebagai landasan dalam mewujudkan praktek tata kelola yang baik.

Tata kelola dapat membantu membuat struktur spesifik dari distribusi hak dan juga tanggung jawab dari setiap orang yang berbeda didalam sebuah organisasi (seperti komisaris, manajer, pemerintahan dan juga stakeholder) dan mematuhi aturan dan juga prosedur dalam proses pengambilan keputusan sehingga keputusan yang dibuat adalah keputusan yang terbaik yang dimiliki oleh masing-masing pemerintah dan tentunya kepemilikan yang berbeda dan terpisah. Hak kekuatan



yang dimiliki stakeholder secara individual dapat mempengaruhi manajemen. Proses maksudnya adalah mekanisme dari hak-hak tersebut. Adapun pengendalian merupakan mekanisme yang memungkinkan stakeholder menerima informasi yang diperlukan seputar kegiatan pemerintah. Praktek dari tata kelola pemerintah menjadi sangat penting untuk dilakukan yang tentunya memiliki efek sangat efektif bagi pemerintah dalam mengarungi pasar di industrinya. Jika mekanisme ini tidak berjalan dengan baik atau bahkan tidak ada, investor dari luar akan enggan bahkan tidak ingin untuk menghabiskan investasinya pada pemerintah tersebut, yang tentunya akan mengganggu keadaan keuangan pemerintah tu sendiri.

Berdasarkan uraian di atas bisa disimpulkan bahwa good corporate governance adalah suatu sistem tata kelola pemerintah yang digunakan untuk meningkatkan kinerja pemerintah dan mengikat semua pihak yang berkepentingan, termasuk didalamnya manajemen pemerintah dengan menggunakan prinsip-prinsip tertentu. Tata kelola pemerintah pada dasarnya dibutuhkan tidak hanya untuk internal pemerintah tetapi juga oleh pihak eksternal. Hal ini akan berhubungan dengan bagaimana pihak eksternal memperoleh informasi dan jaminan terbaik mengenai pemerintah untuk masa yang akan datang.

3. Domain Layanan SPBE

Domain Layanan SPBE merupakan suatu domain yang melakukan tindakan atau memberikan pilihan kepada pengguna SPBE mengenai layanan informasi sampai kebutuhan mengenai dokumen data yang tersedia pada instansi pemerintah yang terkait.

Sesuai dengan prinsipnya, efektivitas dari pelayanan publik adalah seluruh usaha yang dikeluarkan demi terwujudnya sasaran organisasi, walaupun dengan sumber daya yang terbatas. Agar bisa menjamin efektivitasnya, perlu diadakan penyerahan wewenang terkait tugas dan tanggung jawab yang jelas dan tegas.

Pelaksanaan layanan publik juga harus bisa dilakukan dengan efisien dan efektif dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja serta menaikkan tingkat kepuasan masyarakat akan pelayanan tersebut.



2.4 Profil Kabupaten Sumbawa

2.4.1 Demografi Kabupaten Sumbawa

Kabupaten Sumbawa sebagai salah satu daerah dari sepuluh Kabupaten/kota yang berada di wilayah Propinsi Nusa Tenggara Barat terletak di ujung barat Pulau Sumbawa, serta memiliki luas wilayah 6.643,98 Km². Bila dilihat dari segi topografinya, permukaan tanah di wilayah Kabupaten Sumbawa tidak rata atau cenderung berbukit-bukit dengan ketinggian berkisar antara 0 hingga 1.730 meter di atas permukaan air laut, dimana sebagian besar diantaranya yaitu seluas 355.108 ha atau 41,81 persen berada pada ketinggian 100 hingga 500 meter. Sementara itu ketinggian untuk kota-kota kecamatan di Kabupaten Sumbawa berkisar antara 10 sampai 650 meter di atas permukaan air laut. Ibu kota Kecamatan Batulanteh yaitu Semongkat merupakan ibu kota kecamatan yang tertinggi sedangkan Sumbawa Besar merupakan ibu kota kecamatan yang terendah.

Daerah Kabupaten Sumbawa merupakan daerah yang beriklim tropis yang dipengaruhi oleh musim hujan dan musim kemarau. Pada tahun 2011 temperatur maksimum mencapai 36,6° C yang terjadi pada bulan Oktober dan temperature minimum 32,0° C yang terjadi pada bulan Januari. Rata-rata kelembaban udara tertinggi selama tahun 2011 mencapai 89% pada bulan Januari dan terendah mencapai 70% pada bulan Agustus dan September, serta tekanan udara maksimum 1.011,1 mb dan minimum 1.006,5 mb.

2.4.2 Visi dan Misi Kabupaten Sumbawa

Visi Kabupaten Sumbawa adalah:

"Terwujudnya Masyarakat Sumbawa Yang Berdaya Saing, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Semangat Gotong Royong".

Makna yang terkandung di dalam pernyataan Visi tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Berdaya Saing, ditandai dengan adanya sumberdaya manusia yang berkualitas, birokrasi yang bersih, handal dan profesional serta dukungan infrastruktur yang memadai. Berdaya Saing adalah kondisi yang menjadi syarat terwujudnya kedaulatan suatu bangsa sesuai dengan semangat Tri Sakti yang menjadi rujukan utama penyusunan visi dan misi pembangunan nasional. Di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2013-2018 telah disebutkan bahwa masyarakat berdaya saing adalah masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, inovatif, kreatif agar mampu bersaing secara global. Selanjutnya, visi masyarakat berdaya saing di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sumbawa 2011-2016 diartikan sebagai Kemampuan pengelolaan sumberdaya daerah secara bermutu, ekonomis, efektif dan efisien, sehingga lebih unggul dari daerah lainnya. Berdaya saing juga mengandung makna



kemampuan untuk berprestasi dalam bidang kerja masing-masing, dengan kualifikasi atau kualitas tertentu, sehingga dapat sejajar atau bahkan lebih tinggi dengan daerah lain.

2. Mandiri, artinya masyarakat Kabupaten Sumbawa yang mampu memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi, sosial dan berkeadilan. Di samping itu, mandiri juga diartikan sebagai kondisi dimana Pemerintah Daerah mampu mengelola potensi sumberdaya alam dan meningkatkan pendapatan daerah yang dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.
3. Berkepribadian, artinya masyarakat Kabupaten Sumbawa benar-benar memahami dan melaksanakan prinsip hidup (parenti) Tau Samawa yakni takit ke nene kangila boat lenge. Prinsip hidup ini ditandai dengan terwujudnya masyarakat yang religius, patuh kepada hukum dan penuh toleransi terhadap keberagaman.

Sedangkan misi Kabupaten Sumbawa adalah:

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
2. Mewujudkan birokrasi yang bersih, handal dan profesional sehingga mampu menjalankan pemerintahan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*).
3. Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur dengan membangun sinergi yang kuat dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
4. Mengembangkan potensi unggulan daerah dan meningkatkan produktivitas usaha masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat, penurunan angka kemiskinan dan perluasan lapangan kerja.
5. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
6. Mewujudkan masyarakat yang religius dan memelihara toleransi antar umat beragama.
7. Memelihara dan mengembangkan potensi budaya dan kearifan lokal.



2.5 Subyek Penelitian

2.5.1 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa

Dinas Komunikasi Informatika Pemerintah Kabupaten Sumbawa dibentuk oleh peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat No. 50 Tahun 2016 mengenai kedudukan, Organisasi, dan Tugas serta tata kerja dinas. Dinas Kominfo Pemerintah Kabupaten Sumbawa memiliki tugas utama dalam pengelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam bidang komunikasi dan informatika.

Dalam menyelenggarakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Pemerintah Kabupaten Sumbawa mempunyai fungsi :

- Perumusan kebijakan teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Bidang Persandian dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, dan Bidang Statistik serta Balai Informasi Teknologi Edukasi.
- Pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Bidang Persandian dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, dan Bidang Statistik serta Balai Informasi Teknologi Edukasi.
- Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Bidang Komunikasi Publik, Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Bidang Persandian dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, dan Bidang Statistik serta Balai Informasi Teknologi Edukasi.
- Pelaksanaan Administrasi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Dinas Kominfo Kabupaten Sumbawa terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, yang membawahi:
 - Sub Bagian Program;
 - Sub Bagian Keuangan;
 - Sub Bagian Umum.
3. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, yang membawahi:
 - Seksi Pengelolaan dan Dokumentasi Informasi;



- Seksi Publikasi;

- Seksi kelembagaan.

4. Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang membawahi:

- Seksi Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi;

- Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;

- Seksi Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi.

5. Bidang Persandian dan LPSE, yang membawahi:

- Seksi Persandian dan Keamanan Informasi;

- Seksi Layanan Pegadaian Secara Elektronik;

- Seksi Telekomunikasi dan Pengendalian.

6. Bidang Statistik, yang membawahi:

- Seksi Statistik Sosial;

- Seksi Statistik Ekonomik;

- Seksi Statistik SDA dan Infrastruktur.

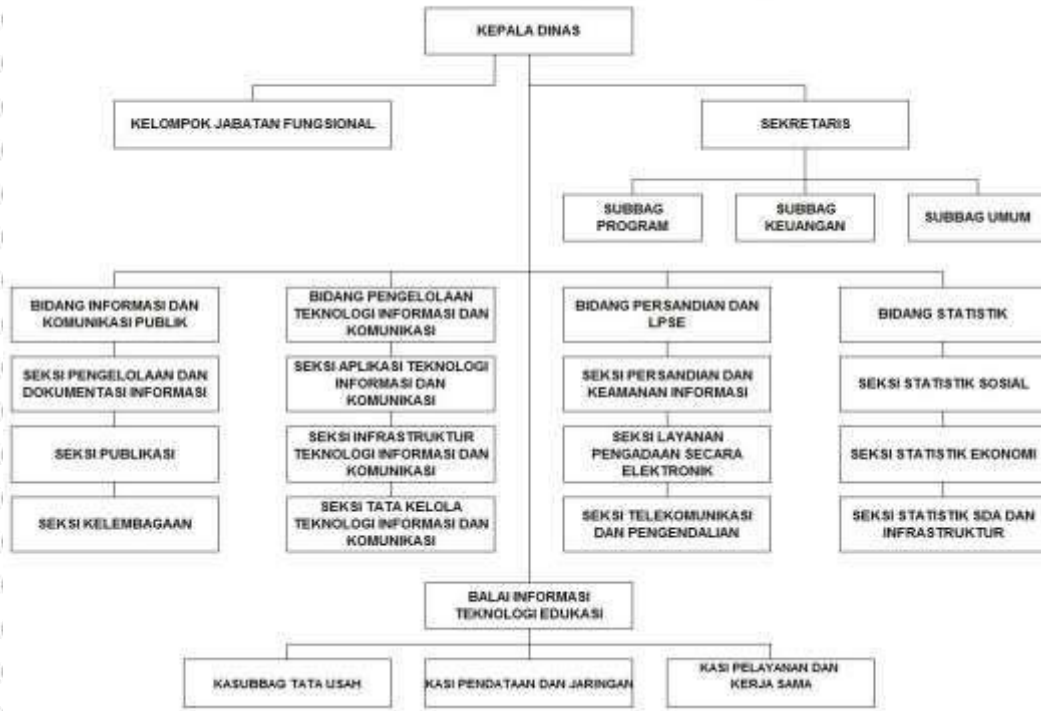
7. UPTD;

8. Kelompok Jabatan Fungsional.



Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Kominfo Kabupaten Sumbawa

Sumber: Lampiran Perwali Kabupaten Sumbawa No. 50 Tahun 2016

2.6 Populasi dan Sampel Penelitian Kualitatif

Populasi merupakan wilayah generalisasi subyek atau obyek dengan kualitas dan karakteristik tertentu yang dipilih oleh peneliti untuk kemudian dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Sedangkan sampel, merupakan bagian dari populasi yang ada (Sugiyono, 2016).

Dalam penelitian kualitatif, terdapat perbedaan dalam memaknai populasi. Menurut Spradley dalam Sugiyono (2016), populasi dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi dinamakan “social situation” atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen, tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*) yang saling berinteraksi secara sinergis.

Penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi karena penelitian kualitatif berawal dari kasus yang ada pada lingkungan sosial tertentu. Hasil dari penelitian kualitatif tidak akan diberlakukan ke populasi, melainkan ditransfer ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan situasi sosial pada kasus yang sedang dipelajari. Sedangkan sampel dalam penelitian kualitatif tidak dinamakan responden,



tetapi sebagai narasumber atau partisipan, informan, teman, guru dalam penelitian. Dalam penelitian ini, istilah yang digunakan adalah narasumber.

Penentuan sampel dalam penelitian kualitatif tidak didasarkan pada perhitungan statistik. Sampel yang dipilih berfungsi untuk mendapatkan informasi maksimum, bukan untuk tujuan generalisasi. Wawancara atau pengisian kuisioner dilakukan kepada orang-orang yang dianggap memahami keadaan dan situasi di lingkup penelitian tersebut, atau yang biasa disebut *purposive*.

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yang merupakan Teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan pertimbangan tertentu seperti narasumber dianggap mengetahui lingkungan subyek yang diteliti atau posisi narasumber yang dapat mempermudah peneliti dalam menjelajahi subyek penelitian.



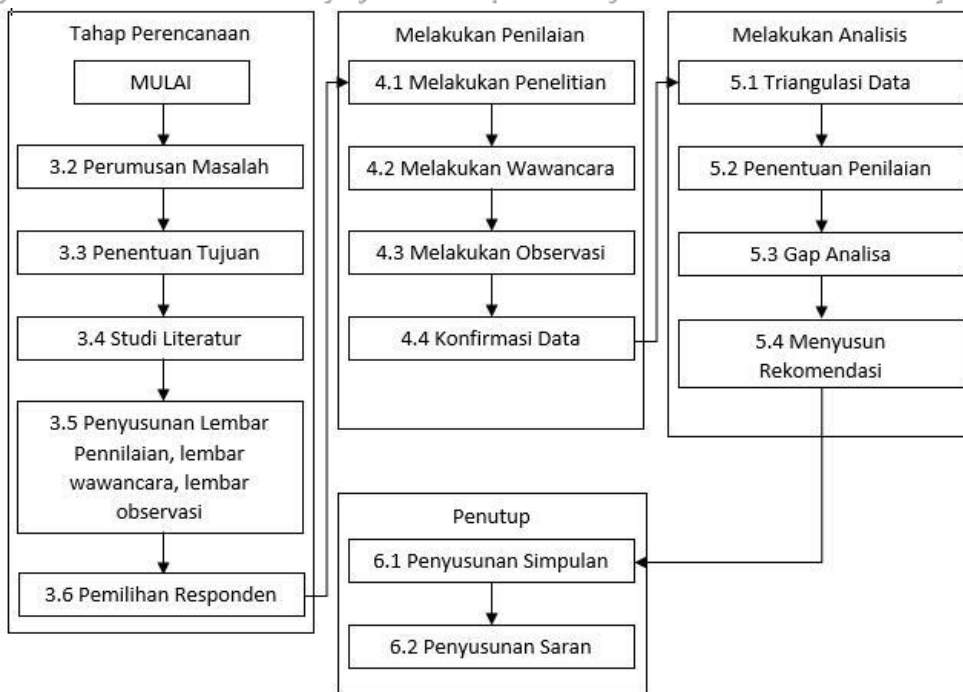
BAB 3 METODOLOGI

3.1 Pendekatan Penelitian

Metode penelitian adalah serangkaian alur dari prosedur yang dilakukan untuk menghasilkan suatu penelitian yang valid dan reliable, metode penelitian yang baik dan benar tidak hanya terkait dengan metode yang digunakan dalam pengumpulan data, namun juga mencakup teknik analisis data yang digunakan serta teknik perumusan masalah yang akan dilakukan (Brewer, 2000). Pada penelitian ini, digunakan metode pengumpulan data kualitatif yang nantinya akan digunakan sebagai bahan evaluasi dari peneran *egovernment* pada Pemerintah Kabupaten Sumbawa.

Penelitian kualitatif sendiri merupakan penelitian yang lebih menekankan dalam strategi *inquiry* atau penyelidikan dari suatu makna dan konsep dari segala fenomena yang ada. Metode ini juga menekankan kualitas dari penggunaan cara penyajian yang sederhana dan naratif. (Yusuf, 2016).

Alur penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam diagram alir seperti Gambar 3.1 berikut:



Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian



3.2 Studi Literatur dan Observasi

3.2.1 Analisis Kebutuhan

Analisis kebutuhan merupakan kegiatan mengumpulkan literatur yang berkaitan mengenai *e-government* untuk memper dalam wawasan, seperti untuk mengetahui sejauh mana *e-government* telah diimplementasikan di Pemerintah Kabupaten Sumbawa. Hukum yang berlaku mengenai *e-government*, dan kondisi penerapan teknologi informasi dalam Pemerintahan Kabupaten Sumbawa. Literatur yang dikumpulkan juga dapat digunakan sebagai bahan studi untuk mendalami pemahaman mengenai kerangka kerja Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) yang akan digunakan dalam penelitian ini.

3.2.2 Subyek dan Obyek Penelitian

Subyek yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah *leader sector* dari Struktur Organisasi Prangkat Daerah yang terdapat di Pemerintah Kabupaten Sumbawa yaitu Dinas Kominfo. Objek yang akan diteliti mencakup evaluasi pemanfaatan teknologi informasi dalam penerapan *e-government* di lingkungan Dinas Kominfo sendiri.

3.3 Pengumpulan Data

3.3.1 Observasi

Observasi merupakan tahapan untuk melakukan pengamatan secara langsung terhadap penerapan SPBE pada instansi pemerintahan atau daerah. Dalam kegiatan observasi ini, peneliti mengamati berbagai hasil penerapan SPBE berdasarkan indikator pada aspek 6 mengenai layanan SPBE pada Pemerintah Kabupaten Sumbawa.

3.3.2 Wawancara

Wawancara merupakan tahapan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data yang nantinya akan dijadikan bahan pertimbangan dalam proses pengisian kuisisioner atau penilaian dalam proses evaluasi penelitian ini. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara tak berstruktur. Wawancara tak berstruktur adalah bentuk wawancara dimana dimana pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis besar permasalahan yang ditanyakan. Dalam bentuk wawancara ini peneliti belum mengetahui data seperti apa yang akan diperoleh, sehingga lebih banyak mendengarkan narasumber (Sugiyono, 2016). Dalam penelitian ini, garis besar pertanyaan didapatkan berdasarkan data penilaian yang ingin dicapai dari kuisisioner yang nantinya akan diisi.



3.3.3 Konfirmasi Data

Konfirmasi Data Merupakan Bagian dalam penelitian yang bertujuan untuk memastikan data yang diambil melalui hasil wawancara dan observasi telah valid dan benar. Validasi sendiri dapat dijadikan acuan dalam penelitian untuk membangun kepercayaan dan kebenaran penelitian sehingga hasil penelitian yang telah dilakukan dapat dipertanggung jawabkan nanti.

3.4 Bobot Domain dan Aspek

Domain dan aspek memiliki bobot nilai yang berbeda. Secara keseluruhan, bobot dari domain Layanan SPBE sendiri memiliki nilai 55%, sedangkan bobot dari domain tata kelola, dan domain kebijakan internal SPBE diberikan nilai lebih kecil. Demikian juga setiap aspek yang ada dalam setiap domain memiliki nilai bobot yang berbeda berdasarkan tingkat kepentingannya. Bobot dari setiap domain dan aspek dapat dilihat pada Tabel 3.3. sedangkan nilai bobot setiap indikator dapat dihitung berdasarkan nilai bobot sebuah aspek dibagi dengan jumlah indikator pada setiap aspek tersebut.

Tabel 3.1 Bobot Domain dan Aspek

Domain dan Aspek Penelitian	Jumlah Indikator	Total Bobot
Domain 1 – Kebijakan Internal SPBE	17	17%
Aspek 1- Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	7	7%
Aspek 2- Kebijakan Internal Layanan SPBE	10	10%
Domain 2 –Tata Kelola SPBE	7	28%
Aspek 3 - Kelembagaan	2	8%
Aspek 4 – Strategi dan Perencanaan	2	8%
Aspek 5 – Teknologi Informasi dan Komunikasi	3	12%
Domain 3 – Layanan SPBE	11	55%
Aspek 6 – Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	7	35%
Aspek 7 – Layanan Publik Berbasis Elektronik	4	20%



3.5 Sistem Penilaian Kerangka Kerja Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Sistem dari penilaian pelaksanaan SPBE dapat dilakukan dengan struktur yang terdiri dari:

1. Domain : Domain adalah bagian dimana pelaksanaan SPBE akan dinilai.
2. Aspek : Aspek adalah bagian didalam domain yang dinilai.
3. Indikator : Indikator adalah sebuah informasi spesifik tentang penerapan SPBE dari suatu aspek yang dinilai.

Batas penelitian dilakukan pada domain 3. Domain 3 terdiri dari beberapa aspek, aspek tersebut memiliki satu atau lebih indikator. Penggambaran mengenai domain, aspek, dan indikator dapat dilihat dengan lebih jelas pada tabel 3.5.1.

Tabel 3.2 Tabel Domain, Aspek, dan Indikator SPBE

Domain 3	Layanan SPBE
Aspek 6	Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik
Indikator 25	Layanan Naskah Dinas
Indikator 26	Layanan Manajemen Kepegawaian
Indikator 27	Layanan Manajemen Perencanaan
Indikator 28	Layanan Manajemen Penganggaran
Indikator 29	Layanan Manajemen Keuangan
Indikator 30	Layanan Manajemen Kinerja

Dalam SPBE terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data evaluasi dari instansi pemerintah pusat atau daerah, metode tersebut antara lain:

1. wawancara: dalam metode wawancara, evaluator dapat menanyakan beberapa pertanyaan atau melakukan klarifikasi kepada responden terkait penerapan SPBE.
2. Evaluasi Dokumen: dalam metode evaluasi dokumen ini, evaluator melakukan evaluasi atau penilaian terhadap jawaban atau penjelasan dari responden mengenai penerapan SPBE.
3. Observasi: dalam metode observasi, evaluator melakukan kunjungan ke unit kerja responden pada instansi pemerintah pusat atau daerah untuk melakukan validasi atas jawaban yang telah diberikan oleh responden.

Untuk mendapatkan kualitas penilaian yang lebih baik, evaluator dapat menggunakan satu atau mengkombinasikan beberapa metode tersebut.



3.5.1 Indeks Penilaian SPBE

Indeks penilaian pada SPBE dihitung berdasarkan agregat dari nilai tingkat kematangan (maturity level) pada indikator yang dijadikan bahan penilaian. Nilai indeks sendiri terdiri dari beberapa jenis, yaitu:

1. Nilai Indeks Domain merupakan nilai yang merepresentasikan tingkat kematangan dari pelaksanaan suatu domain SPBE. Nilai Indeks Domain adalah nilai hasil perhitungan antar nilai Indeks Aspek dan bobot relatif setiap aspek terhadap bobot domainnya.
2. Nilai Indeks Aspek merupakan nilai yang merepresentasikan tingkat kematangan (maturity level) pada suatu aspek tertentu. Nilai Indeks Aspek adalah nilai keseluruhan dari perkalian antara nilai tingkat kematangan setiap indikator dan bobot relatif indikator tersebut terhadap bobot dari aspek tertentu.
3. Nilai Indeks SPBE adalah nilai yang merepresentasikan tingkat keseluruhan dari pelaksanaan SPBE. Nilai Indeks SPBE merupakan nilai hasil dari perhitungan terhadap nilai Indeks Domain dan bobot domain.

Nilai Indeks yang merepresentasikan tingkatan dari pelaksanaan SPBE dikelompokkan menjadi beberapa kategori yang dapat dilihat pada Tabel 3.5.2.

Tabel 3.3 Kelompok nilai dalam SPBE

No.	Nilai	Keterangan
1.	4,2 dan 5,0	Memuaskan
2.	3,5 dan < 4,2	Sangat Baik
3.	2,6 dan < 3,5	Baik
4.	1,8 dan < 2,6	Cukup
5.	< 1,8	Kurang

3.6 Tingkat Kematangan Kapabilitas Pada Kerangka Kerja Sistem

Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)

Tingkat kematangan kapabilitas atau tingkat kematangan sendiri pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dibagi menjadi 2, yaitu tingkat kematangan kapabilitas proses dan tingkat kematangan kapabilitas fungsi.

3.6.1 Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses

Tingkat kematangan kapabilitas proses dalam SPBE merupakan suatu tingkatan yang menunjukkan tingkatan dari proses SPBE yang telah dijalankan pada suatu instansi pemerintahan. Pada proses penilaian tingkat kematangan dari proses SPBE,



domain Kebijakan Internal dan Tata Kelola SPBE memiliki keterkaitan yang mempengaruhi tingkat kematangan.

Tingkat kematangan tersebut dapat dilihat dalam ukuran karakteristik yang telah di standarisasi oleh SPBE, karakteristik tersebut dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 3.4 Tingkat Kematangan pada Domain Tata Kelola SPBE dan Kebijakan Internal SPBE

Tingkatan (Level)	Karakteristik
1 - Rintisan	<ul style="list-style-type: none"> Proses Pelaksanaan tata kelola Dilakukan tanpa terjadwal, tidak terorganisir, tidak ada proses pengawasan, dan hasil dari proses tata kelola tersebut tidak dapat di prediksi. Kebijakan Internal tidak tersedia atau masih dalam bentuk konsep yang belum di jalankan.
2 - Terkelola	<ul style="list-style-type: none"> Proses pelaksanaan tata kelola dilakukan dengan dasar-dasar manajemen yang sudah didefinisikan dan telah didokumentasikan, dilaksanakan sesuai dengan prosedur masing-masing unit atau organisasi. Kebijakan Internal sudah legal, namun proses pengaturannya masih bersifat sektoral.
3 - Terstandarisasi	<ul style="list-style-type: none"> Proses tata kelola sudah dapat dilaksanakan secara keseluruhan dan terstandarisasi oleh semua unit atau organisasi. Kebijakan internal sudah mengatur standar dari proses pelaksanaan tata kelola untuk semua unit dan organisasi yang terkait, namun belum mengatur keselarasan antar setiap proses tata kelola.



Tabel 3.4 Tingkat Kematangan pada Domain Tata Kelola SPBE dan Kebijakan Internal SPBE (Lanjutan)

4 – Terintegrasi dan Terukur	<ul style="list-style-type: none"> • Proses tata kelola sudah dilaksanakan dan terintegrasi dengan proses tata kelola yang lain dan sudah terukur prosesnya secara kuantitatif. • Kebijakan internal sudah mengatur kesinambungan antar proses tata kelola dan proses pengukuran kinerjanya.
5 - Optimum	<ul style="list-style-type: none"> • Proses tata kelola sudah bisa dilaksanakan dengan kualitas yang terus meningkat. • Kebijakan internal sudah mengatur mengenai mekanisme evaluasi yang berkelanjutan dan perubahan manajemen.

Pada tingkat rintisan, instansi pemerintah pusat dan daerah sudah mengetahui tentang kebutuhan dari proses tata kelola SPBE yang akan dilaksanakan. Pelaksanaan proses tata kelola masih bersifat sementara atau sewaktu-waktu berdasarkan kepentingan yang sesaat, tidak terorganisir dengan baik, tidak terpantau, dan hasilnya tidak bisa diprediksi. Pimpinan pada setiap instansi yang bersangkutan harus mempunyai kesadaran sendiri untuk melakukan proses tata kelola SPBE, namun pelaksana sendiri tidak mengerti proses apa yang harus dilakukan. Kebijakan internal sendiri yang merupakan dasar dari pelaksanaan tata kelola SPBE masih merupakan konsep yang belum diterapkan.

Pada tingkatan terkelola, instansi pemerintahan pusat dan daerah melaksanakan proses tata kelola SPBE hanya dengan landasan manajemen seperti perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Namun setiap unit dari instansi pemerintahan yang bersangkutan melakukan proses tata kelola SPBE tersebut berdasarkan pemahamannya sendiri. Pimpinan instansi belum memberikan pengarah dan belum mengendalikan pelaksanaan proses tata kelola SPBE tersebut. Kebijakan internal yang merupakan landasan dari proses tata kelola SPBE sudah dilegalisasi, namun proses pengaturannya masih bersifat sektoral sehingga tidak bisa membuat pelaksanaan tata kelola SPBE tersebut menjadi terpadu.

Pada tingkat terstandarisasi, pemerintahan pusat dan daerah sudah melaksanakan proses tata kelola SPBE dengan dasar manajemen. Setiap bagian dari



organisasi sudah bisa melaksanakan proses tata kelola SPBE dengan cara yang sama. Pimpinan instansi pemerintahan yang terkait juga sudah mampu mengendalikan proses tata kelola SPBE pada tiap organisasi. Kebijakan internal sudah mengatur standar pelaksanaan proses tata kelola SPBE namun belum mengatur keselarasannya dengan proses SPBE yang lain.

Pada tingkat yang terintegrasi dan terukur, pemerintahan pusat dan daerah sudah melaksanakan proses tata kelola SPBE secara selaras dengan proses tata kelola SPBE lain yang terkait dan sudah menentukan mekanisme dari proses pengukuran kinerja dari setiap proses tata kelola SPBE yang terkait. Kebijakan internal sudah menjadi landasan pelaksanaan proses tata kelola SPBE dan sudah bisa mengatur keselarasan antar setiap proses tata kelola SPBE.

Pada tingkat optimum, instansi pemerintahan pusat dan daerah sudah melakukan peningkatan kualitas dari proses tata kelola SPBE secara berkelanjutan yang didasarkan oleh hasil evaluasi tiap proses tata kelola SPBE tersebut. Perubahan proses tata kelola yang diakibatkan oleh perubahan lingkungan internal dan eksternal sudah bisa dilaksanakan dengan baik. Resiko dari suatu perubahan proses tata kelola SPBE sudah dapat diukur dan diantisipasi. Kebijakan mekanisme dari evaluasi proses tata kelola SPBE dilakukan secara berkelanjutan.

3.6.2 Tingkat Kematangan Kapabilitas Fungsi

Tingkat kematangan kapabilitas fungsi SPBE merupakan tingkat kematangan kapabilitas pada domain layanan SPBE. Karakteristik dari tingkat kematangan SPBE dapat ditunjukkan lebih baik pada Tabel 3.

Tabel 3.5 Tingkat Kematangan pada Domain Layanan SPBE

Tingkat	Kriteria
- Informasi	Layanan SPBE sudah dilakukan dalam bentuk penyebaran informasi satu arah.
- Interaksi	Layanan SPBE sudah dilakukan dalam bentuk pertukaran informasi dua arah.
- Transaksi	Layanan SPBE dilakukan dalam bentuk pertukaran informasi dan layanan.
- Kolaborasi	Layanan SPBE dilakukan menggunakan layanan SPBE yang lain yang sudah terintegrasi.
- Optimasi	Layanan SPBE sudah dapat beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan di lingkungan internal maupun eksternal.



Pada tingkat informasi, instansi pemerintah pusat dan daerah telah menyediakan sistem berupa aplikasi yang hanya mampu memberikan layanan informasi satu arah kepada pengguna SPBE seperti informasi mengenai struktur organisasi, informasi mengenai ketersediaan layanan, dan pemberian informasi mengenai referensi atau tautan lainnya. Pada tahap ini pengguna layanan SPBE tidak bisa melakukan interaksi kepada sistem aplikasi tersebut.

Pada tingkat interaksi, instansi pemerintah pusat dan daerah telah menyediakan sistem yang memiliki fungsi interaksi, karena itu, pengguna SPBE dapat melakukan pengunduhan informasi atau dokumen, serta dapat mengunggah informasi atau dokumen ke dalam sistem aplikasi tersebut. Namun aplikasi tersebut tidak memberikan layanan respon dari proses interaksi tersebut. Pengguna SPBE juga bisa melakukan pencarian mengenai informasi yang tersedia pada sistem aplikasi.

Pada tingkat transaksi, instansi pemerintah pusat dan daerah sudah menyediakan sistem berupa aplikasi yang mempunyai fungsi transaksi, yaitu fungsi yang memberikan layanan transaksi seperti pembayaran atau pertukaran informasi. Sistem dari aplikasi ini memungkinkan pengguna SPBE untuk melakukan pembayaran melalui kanal lain seperti perbankan dan lainnya, selanjutnya sistem aplikasi ini dapat menerima layanan SPBE. Pengguna SPBE juga bisa mengunggah informasi atau dokumen, melakukan proses persetujuan, atau mengirimkan notifikasi ke dalam sistem aplikasi yang nantinya sistem akan merespon dengan memberikan layanan SPBE.

Pada tingkat kolaborasi, instansi pemerintah pusat dan daerah sudah menyediakan sistem aplikasi yang dapat memberikan layanan SPBE yang merupakan hasil dari kolaborasi atau integrasi dengan layanan SPBE lainnya yang berada dalam satu alur kerja. Kolaborasi yang dimiliki sistem ini dapat dilakukan dengan layanan SPBE lain yang berbeda. Sebagai contoh, layanan SPBE pada layanan pengadaan dan layanan keuangan pada satu instansi yang sama. Selanjutnya layanan SPBE ini juga bisa dilakukan kolaborasi secara vertikal dimana layanan SPBE dapat dikolaborasikan secara berjenjang untuk memberikan suatu layanan baru, seperti agregasi data dari pemerintah pusat ke daerah atau sebaliknya.

Pada tingkat optimalisasi, instansi pemerintah pusat dan daerah sudah menyediakan sistem aplikasi dengan ability yang dapat merespon terhadap perubahan lingkungan kerja maupun kebutuhan pengguna SPBE, baik dari lingkup internal maupun lingkup eksternal. Perubahan yang dimaksud dapat dicontohkan sebagai perubahan peraturan dari suatu layanan SPBE, teknologi yang digunakan, serta kebutuhan pengguna layanan SPBE. Perubahan yang dilakukan oleh sistem memiliki dampak yang dapat diukur sehingga dampak tersebut dapat diantisipasi secara maksimal. Pengguna dari layanan SPBE ini juga mampu memberikan tambahan atau peningkatan dari segi kualitas layanan SPBE tersebut.



3.7 Analisis dan Pengolahan Data

3.7.1 Penilaian Penerapan *E-Government* di SOPD Terkait

Penilaian dilakukan dengan menganalisis data kualitatif yang didapat dari narasumber melalui kuisisioner, wawancara dan observasi. Kemudian membandingkan data tersebut dengan skor penilaian yang terdapat didalam pedoman penilaian kerangka kerja SPBE (Lampiran A). Proses penilaian mengacu pada sub dimensi dan kriteria data yang terdapat di setiap dimensi kerangka kerja SPBE.

3.7.2 Pembuatan Rekomendasi

Pembuatan rekomendasi didasari dengan nilai hasil yang telah dianalisis dari proses wawancara dan pengambilan nilai dari kuisisioner. Proses penilaian dan analisis yang dilakukan terhadap Dinas Kominfo dilakukan berdasarkan standarisasi dari kerangka kerja SPBE sendiri. Rekomendasi yang nantinya dihasilkan bertujuan agar pelayanan *e-government* di Pemerintah Kabupaten Sumbawa dapat mencapai kategori penilaian Memuaskan berdasarkan kerangka kerja SPBE.

3.8 Kesimpulan

Pembuatan kesimpulan dari hasil penelitian ini didasarkan oleh data dan analisis yang sudah melalui tahapan observasi, wawancara, dan kuisisioner dimana hal tersebut akan dibahas lebih mendalam pada BAB 4 dan BAB 5. Putusan nilai yang diberikan kepada penerapan *e-government* di lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa sudah berdasarkan standar kerangka kerja Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang nantinya akan disimpulkan pada BAB 6.



BAB 4 HASIL DAN ANALISIS

4.1 Penilaian Domain Layanan SPBE

Penilaian domain Layanan SPBE bertujuan untuk memberikan gambaran yang mudah dipahami oleh pengguna SPBE yang disediakan oleh Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah seperti informasi, interaksi, transaksi, kolaborasi dan optimalisasi di Kabupaten Sumbawa dengan semakin tinggi tingkat kematangan layanan SPBE. Penjelasan mengenai hasil dan analisis ini disajikan dalam bentuk tabel dan berisi aspek 6 yang di terapkan di dalam domain layanan SPBE, indikator yang menjadi fokus penilaian, dan penilaian tingkat kematangan dan bobot antara 1 sampai 5 dengan keterangan dari nilai kondisi tersebut, berdasarkan pedoman penilaian sistem pemerintahan berbasis elektronik SPBE (Tabel 3. Tingkat Kematangan pada Domain SPBE).

4.2 Aspek 6 Layanan Administrasi Pemerintah Berbasis Elektronik

Hal yang dinilai dalam aspek layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik adalah apakah instansi terkait telah memiliki proses layanan yang berkaitan dengan penerapan layannya SPBE, bagaimana pelaksanaannya dan apakah sudah di dokumentasikan dengan baik.

4.2.1 Layanan Naskah Dinas

Layanan Naskah Dinas merupakan layanan yang memberikan informasi tertulis sebagai media komunikasi kedinasan yang sah. Layanan naskah dinas ini dibuat dan diterima oleh pejabat yang berwenang pada lingkup instansi pemerintah pusat dan daerah dalam rangka menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan. Dalam penilaiannya, layanan naskah dinas dinilai berdasarkan tugas atau fungsi dasarnya yaitu untuk memberikan manfaat dalam pengelolaan naskah dinas.

Tabel 4.1 Penilaian Indikator Layanan Naskah Dinas

Aspek 6	Indikator 25	Nilai Kondisi	
		Skor	Keterangan
Layanan Administrasi Berbasis Elektronik (SPBE)	Layanan Naskah Dinas	2	Instansi pemerintah pusat dan daerah sudah memiliki system berupa aplikasi naskah dinas elektronik. Sistem ini sendiri sudah menyediakan layanan interaksi yang dapat dilakukan seperti mencari informasi yang tersedia, mengunggah dokumen serta mengunduh dokumen yang berupa naskah tertulis.



Dari tabel 4.1 didapatkan hasil skor 2 untuk indikator 25, hal tersebut dikarenakan dari Layanan Naskah Dinas sudah memenuhi persyaratan pada skor minimum 0 dan 1 yang berarti sistem naskah dinas elektronik hanya menyediakan diseminasi (penyebaran satu arah) informasi seperti surat undangan, surat disposisi, dan surat resmi, namun Layanan Naskah Dinas belum memenuhi persyaratan untuk mencapai level 3 yaitu sistem naskah dinas harus sudah menyediakan layanan yang memungkinkan pengguna SPBE untuk melakukan transaksi, yaitu fungsi yang memberikan layanan transaksi seperti pembayaran atau pertukaran informasi. Sistem dari aplikasi ini memungkinkan pengguna SPBE untuk melakukan pembayaran melalui kanal lain seperti perbankan dan lainnya, selanjutnya sistem aplikasi ini dapat menerima layanan SPBE. Pengguna SPBE juga bisa mengunggah informasi atau dokumen, melakukan proses persetujuan, atau mengirimkan notifikasi ke dalam sistem aplikasi yang nantinya sistem akan merespon dengan memberikan layanan SPBE.

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, hasil dari tingkat kematangan (Lampiran A) dan wawancara (Lampiran B) yang dilakukan, diketahui bahwa pada tahun 2018, sudah dikeluarkan Peraturan Presiden yang membahas proses layanan kepada pengguna SPBE, melalui Peraturan Presiden No. 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintah berbasis elektronik yang di tetapkan pada 19 Februari 2018 (Lampiran C surat evaluasi pedoman spbe). Dokumen layanan kepada pengguna SPBE ini berisi layanan yang diselenggarakan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE dalam Instansi Pusat atau dalam Pemerintah Daerah, koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE. Untuk menjalankan layanan naskah dinas yang diperlukan, Dinas Kominfo Kabupaten Sumbawa menggunakan aplikasi SIPAS, dimana aplikasi tersebut sudah memenuhi beberapa fungsi yang dibutuhkan (Lampiran F).

4.2.2 Layanan Manajemen Kepegawaian

Pada Layanan Manajemen Kepegawaian, hal yang dijadikan penilaian adalah rangkaian dari suatu proses yang bertujuan untuk menghasilkan pengelolaan pegawai yang efektif dan efisien serta memiliki kualitas dan kesinambungan fungsi yang baik. Fungsi utama dari layanan manajemen kepegawaian ini sendiri adalah untuk memberikan manfaat dalam proses manajemen kepegawaian yang baik dalam instansi pemerintah pusat dan daerah.



Tabel 4.2 Penilaian Indikator Layanan Manajemen Kepegawaian

Aspek 6	Indikator 26	Nilai Kondisi	
		Skor	Keterangan
Layanan Administrasi Berbasis Elektronik (SPBE)	Layanan Manajemen Kepegawaian	3	Instansi pemerintah pusat dan daerah sudah memiliki system aplikasi kepegawain yang memiliki fungsi transaksi. Fungsi ini dapat dijalankan untuk memenuhi kebutuhan pengguna layanan SPBE seperti layanan persetujuan kenaikan pangkat atau persetujuan dalam pengajuan cuti.

Dari tabel 4.2 didapatkan hasil skor 3 untuk indikator 26 Layanan Manajemen Kepegawaian, hal tersebut dikarenakan Layanan Manajemen Kepegawaian sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan hasil minimum untuk level 0, 1, dan 2 yaitu Sistem manajemen kepegawaian harus memiliki fungsi interaksi yang dapat digunakan oleh pengguna SPBE. Sistem ini memungkinkan pengguna untuk mencari informasi yang tersedia, dan mengunggah atau mengunduh dokumen. Namun Layanan Manajemen Kepegawaian juga belum memenuhi syarat minimum untuk mendapatkan skor atau level 4 karena Sistem manajemen kepegawaian belum menyediakan layanan kolaborasi, layanan kolaborasi yang dimaksud adalah sistem aplikasi dari layanan kepegawaian masih terpisah atau tidak terintegrasi dengan layanan SPBE manapun seperti dengan layanan naskah dinas atau lainnya.

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, hasil dari tingkat kematangan (Lampiran D) dan wawancara (Lampiran E) yang dilakukan, dinas Kominfo Kabupaten Sumbawa sudah memiliki sistem aplikasi kepegawain yang memiliki fungsi transaksi. Fungsi ini dapat dijalankan untuk memenuhi kebutuhan pengguna layanan SPBE seperti layanan persetujuan kenaikan pangkat atau persetujuan dalam pengajuan cuti. Hal tersebut didukung dengan penggunaan aplikasi SAPK (Sistem Pelayanan Administrasi Kepegawaian) yang telah diberlakukan sejak 10 april 2018. SAPK sendiri merupakan sistem informasi berbasis komputer yang disusun sedemikian rupa untuk pelayanan kepegawaian. Sampai saat ini SAPK sendiri melayani proses pelayanan kepegawaian antara lain penetapan NIP, pencetakan SK pengangkatan CPNS, pemberian nota persetujuan/pertimbangan teknis kenaikan pangkat dan pencetakan SK Kenaikan Pangkat, penetapan dan pencetakan surat keputusan pemberhentian dengan hak pensiun dan untuk pembaruan data mutasi lain-lain. Selain itu SAPK juga terintegrasi dengan layanan Tabungan Asuransi Pensiun (TASPEN) (Lampiran G).



4.2.3 Layanan Manajemen Perencanaan

Layanan Manajemen Perencanaan merupakan layanan yang diharapkan memiliki fungsi untuk menghasilkan pengolahan perencanaan yang efektif dan efisien. Hal yang akan dinilai dalam aspek Layanan Manajemen Perencanaan sendiri adalah proses yang dilakukan untuk mendapatkan hasil tersebut sehingga memberikan manfaat dalam proses pengolahan perencanaan bagi perintah pusat dan daerah.

Tabel 4.3 Penilaian Indikator Layanan Manajemen Perencanaan

Aspek 6	Indikator 27	Nilai Kondisi	
		Skor	Keterangan
Layanan Administrasi Berbasis Elektronik (SPBE)	Layanan Manajemen Perencanaan	3	Instansi pemerintah pusat dan daerah sudah memiliki system untuk mendukung manajemen perencanaan yang berfungsi dalam proses layanan transaksi. Layanan ini meliputi pengunduhan dan pengunggahan dokumen terkait perencanaan, dan proses mengenai validasinya.

Dari tabel 4.3 didapatkan hasil skor 3 untuk indikator 27 Layanan Manajemen Perencanaan, hal tersebut dikarenakan Layanan Manajemen Perencanaan sudah memenuhi standar minimum untuk skor atau level 0, 1, dan 2 yaitu Sistem manajemen perencanaan sudah memiliki sistem untuk mendukung manajemen perencanaan yang berfungsi dalam proses layanan transaksi. Layanan ini meliputi pengunduhan dan pengunggahan dokumen terkait penganggaran, dan proses mengenai validasinya. Namun Layanan Manajemen Perencanaan belum memenuhi standar untuk mendapatkan skor 4 karena Sistem manajemen perencanaan belum memiliki layanan kolaborasi yang memungkinkan layanan manajemen perencanaan berintegrasi dengan layanan SPBE yang lain, seperti layanan manajemen penganggaran atau layanan lainnya.

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, hasil dari tingkat kematangan (Lampiran H) dan wawancara (Lampiran I) yang dilakukan, dinas Kominfo Kabupaten Sumbawa sudah memiliki sistem untuk mendukung manajemen perencanaan yang berfungsi dalam proses layanan transaksi. Layanan ini meliputi pengunduhan dan pengunggahan dokumen terkait penganggaran, dan proses mengenai validasinya. Hal tersebut didukung dengan adanya sistem informasi berbasis web dengan nama SIMRENDA daerah Sumbawa yang bisa diakses pada www.simrenda.sumbawakab.go.id. SIMRENDA sendiri merupakan Sistem Manajemen Perencanaan Daerah yang sudah digunakan sejak tahun 2016 di Kabupaten Sumbawa, dan sampai saat ini sudah banyak perencanaan yang berhasil



di selesaikan seperti memelihara dan mengembangkan potensi budaya dan kearifan lokal pada tahun 2016-2017 (Lampiran J).

4.2.4 Layanan Manajemen Penganggaran

Layanan Manajemen Penganggaran merupakan layanan SPBE yang berfungsi untuk melakukan pengolahan data penganggaran pada instansi pemerintah pusat dan daerah. Penilaian pada Layanan Manajemen penganggaran ini diharapkan dapat menghasilkan pengolahan data penganggaran yang efektif dan efisien serta akuntabel sehingga memberikan manfaat yang baik untuk pemerintah pusat dan daerah.

Tabel 4.4 Penilaian Indikator Layanan Manajemen Penganggaran

Aspek 6	Indikator 28	Nilai Kondisi	
		Skor	Keterangan
Layanan Administrasi Berbasis Elektronik (SPBE)	Layanan Manajemen Penganggaran	3	Instansi pemerintah pusat dan daerah sudah memiliki system layanan manajemen penganggaran yang memiliki fungsi layanan transaksi. Layanan transaksi yang dimaksud adalah layanan yang memungkinkan pengguna SPBE untuk mengunggah dan mengunduh dokumen terkait penganggaran, serta proses validasi data tersebut.

Dari tabel 4.4 didapatkan hasil skor 3 untuk indikator 28 Layanan Manajemen Penganggaran, hal tersebut disebabkan karena Layanan Manajemen Penganggaran telah memenuhi standar minimum untuk mendapatkan skor atau level 0, 1, dan 2 yaitu Sistem manajemen penganggaran telah memiliki fungsi layanan transaksi. Layanan transaksi yang dimaksud adalah layanan yang memungkinkan pengguna SPBE untuk mengunggah dan mengunduh dokumen terkait penganggaran, serta proses validasi data tersebut. Namun Layanan Manajemen Penganggaran belum dapat memenuhi standar untuk mendapatkan skor 4 karena Sistem Manajemen Penganggaran belum memiliki layanan kolaborasi. Layanan yang dimaksud adalah layanan yang memungkinkan Layanan Manajemen Penganggaran berkolaborasi atau berintegrasi dengan layanan SPBE lainnya seperti layanan manajemen perencanaan atau layanan manajemen kepegawaian. Layanan manajemen penganggaran sendiri juga belum menyediakan layanan kolaborasi secara vertikal dengan layanan instansi pemerintah lain, seperti layanan pada Kementerian Keuangan.

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, hasil dari tingkat kematangan (Lampiran K) dan wawancara (Lampiran L) yang dilakukan, dinas Kominfo Kabupaten Sumbawa sudah memiliki sistem manajemen penganggaran yang menyediakan layanan transaksi



yang memungkinkan pengguna SPBE untuk mengunggah atau mengunduh dokumen penganggaran serta melakukan serangkaian proses validasinya. Hal ini didukung dengan adanya SIMDA Keuangan Kabupaten Sumbawa, SIMDA keuangan Kabupaten Sumbawa sendiri merupakan Sistem Informasi Manajemen Daerah yang memungkinkan pengguna untuk mengunggah perencanaan anggaran pada tahun berikutnya untuk penambahan unit kerja dan lain-lain, seperti pengunggahan data pembangunan jembatan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2017 yang dapat dilihat pada halaman SIMRENDA Kabupaten Sumbawa (Lampiran M).

4.2.5 Layanan Manajemen Keuangan

Layanan Manajemen Keuangan merupakan layanan yang bertujuan untuk menghasilkan pengolahan data keuangan yang efektif dan efisien. Hal yang akan dinilai pada Layanan Manajemen Keuangan juga berkaitan dengan proses untuk melakukan pengolahan data tersebut yang nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat pada pengolahan data keuangan instansi pusat dan daerah.

Tabel 4.5 Penilaian Indikator Layanan Manajemen Keuangan

Aspek 6	Indikator 29	Nilai Kondisi	
		Skor	Keterangan
Layanan Administrasi Berbasis Elektronik (SPBE)	Layanan Manajemen Keuangan	3	Instansi pemerintah pusat dan daerah sudah memiliki system layanan manajemen keuangan yang memiliki layanan transaksi. Layanan yang dimaksud adalah pengguna layanan SPBE dapat melakukan pengunduhan dan pengunggahan dokumen terkait data keuangan serta melakukan proses validasi data keuangan tersebut.

Dari tabel 4.5 didapatkan hasil skor 3 untuk indikator 29 Layanan Manajemen Keuangan, hal ini dikarenakan Layanan Manajemen Keuangan sudah memenuhi standar minimum untuk mendapatkan skor atau level 0, 1, dan 2 yaitu Sistem Manajemen Keuangan sudah memiliki layanan transaksi yang memungkinkan pengguna SPBE untuk mengunduh dan mengunggah dokumen terkait data keuangan, dan sistem juga dapat memberikan layanan mengenai proses validasi dari dokumen terkait data keuangan tersebut di lingkup internal pemerintah pusat dan daerah. Namun Layanan Manajemen Keuangan belum dapat memenuhi standar minimum untuk mendapatkan skor 4 karena Sistem dari Layanan Manajemen Keuangan belum memiliki fungsi kolaborasi. Fungsi ini bermaksud memberikan layanan manajemen keuangan yang dapat diintegrasikan dengan layanan SPBE lain seperti Layanan Manajemen Penganggaran dan lainnya.



Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, hasil dari tingkat kematangan (Lampiran N) dan wawancara (Lampiran O) yang dilakukan, dinas Kominfo Kabupaten Sumbawa sudah memiliki sistem manajemen keuangan yang memungkinkan pengguna untuk mengunduh dan mengunggah informasi keuangan, dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan dan validasi keuangan, dan analisis keuangan. Hal tersebut didukung dengan penggunaan SIMDA keuangan Kabupaten Sumbawa pada tahun 2017 oleh dinas kelautan dan perikanan untuk pengadaan 1 paket bibit perikanan yang datanya dapat dilihat pada halaman SIMRENDA Kabupaten Sumbawa (Lampiran P).

4.2.6 Layanan Manajemen Kinerja

Layanan Manajemen Kinerja merupakan layanan SPBE yang memungkinkan pengguna SPBE untuk mengelola kegiatan atau sasaran dari suatu unit atau organisasi telah berhasil dicapai secara konsisten. Hal yang akan dinilai dalam Layanan Manajemen Kinerja ini adalah proses dalam mencapai hasil tersebut yang efektif dan efisien sehingga dapat bermanfaat bagi instansi pemerintah pusat dan daerah.

Tabel 4.6 Penilaian Indikator Layanan Manajemen Kinerja

Aspek 6	Indikator 30	Nilai Kondisi	
		Skor	Keterangan
Layanan Administrasi Berbasis Elektronik (SPBE)	Layanan Manajemen Kinerja	3	Instansi pemerintah pusat dan daerah sudah memiliki system layanan manajemen kinerja yang memberikan layanan transaksi. Layanan transaksi ini memungkinkan pengguna SPBE untuk mengunggah atau mengunduh dokumen terkait dengan kinerja. Sistem dari layanan ini juga memungkinkan pengguna untuk melakukan mekanisme validasi dan persetujuan kinerja dari atasan.

Dari tabel 4.6 didapatkan hasil skor 3 untuk indikator 30 Layanan Manajemen Kinerja, hal ini dikarenakan Layanan Manajemen Kinerja telah memenuhi standar minimum untuk mendapatkan skor atau level 0, 1, dan 2 yaitu sistem Layanan Manajemen Kinerja sudah memberikan layanan transaksi. Layanan ini memungkinkan pengguna SPBE untuk mengunggah atau mengunduh dokumen yang berkaitan dengan kinerja. Sistem dari layanan ini juga memungkinkan pengguna untuk melakukan mekanisme validasi dan persetujuan kinerja dari atasan di lingkup internal instansi pemerintah pusat dan daerah. Namun Layanan Manajemen Kinerja belum dapat memenuhi standar minimum untuk mendapatkan skor atau level 4



karena sistem Layanan Manajemen Kinerja belum memiliki layanan kolaborasi. Layanan kolaborasi ini adalah layanan yang memungkinkan sistem manajemen kinerja terintegrasi dengan layanan SPBE lain seperti layanan manajemen kepegawaian dan lainnya.

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, hasil dari tingkat kematangan (Lampiran Q) dan wawancara (Lampiran R) yang dilakukan, dinas Kominfo Kabupaten Sumbawa sudah memiliki sistem layanan manajemen kinerja yang memberikan layanan transaksi. Layanan ini memungkinkan pengguna layanan SPBE untuk mengunggah dan mengunduh dokumen terkait data kinerja serta melakukan fungsi validasi dan persetujuan kinerja dari atasan dalam lingkup internal instansi pemerintah pusat dan daerah. Hal tersebut didukung dengan penggunaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara Elektronik (E-SAKIP) pada Kabupaten Sumbawa. E-SAKIP sendiri adalah aplikasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara elektronik (E-SAKIP) yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja SKPD pada khususnya dan kinerja Pemerintah Kabupaten Sumbawa pada umumnya. Informasi yang dihasilkan dari aplikasi E-SAKIP ini dapat diakses oleh publik, dengan harapan masyarakat dapat turut serta memantau, menilai dan memberikan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa bilamana terdapat SKPD yang kinerjanya kurang maksimal. Pada Kabupaten Sumbawa sendiri, e-SAKIP telah digunakan sejak tahun 2016 (Lampiran S).

4.2.7 Layanan Pengadaan

Layanan Pengadaan merupakan layanan dalam SPBE yang bertujuan untuk mengelola data terkait dengan penyediaan atau pemenuhan kebutuhan barang dan jasa dalam lingkup instansi pemerintah pusat dan daerah. Hal yang akan dinilai dalam layanan pengadaan adalah proses peyediaan atau pemenuhan tersebut sehingga dapat memberikan manfaat bagi instansi pemerintah pusat dan daerah.



Tabel 4.7 Penilaian Indikator Layanan Pengadaan

Aspek 6	Indikator 31	Nilai Kondisi	
		Skor	Keterangan
Layanan Administrasi Berbasis Elektronik (SPBE)	Layanan Pengadaan	3	Instansi pemerintah pusat dan daerah sudah memiliki system pengadaan yang memberikan layanan transaksi. Layanan transaksi ini memungkinkan pengguna SPBE untuk mengunggah dan mengunduh dokumen terkait dengan pengadaan barang dan jasa, layanan ini juga memungkinkan untuk melakukan proses validasi dan persetujuan dalam hal pengadaan.

Berdasarkan tabel 4.7 didapatkan hasil skor 3 untuk indikator 31 Layanan Pengadaan, hal tersebut dikarenakan Layanan Pengadaan sudah memenuhi standar minimum untuk mendapatkan skor atau level 0, 1, dan 2 yaitu sistem Layanan Pengadaan sudah memiliki fungsi transaksi. Fungsi ini memungkinkan pengguna melakukan pengunggahan atau pengunduhan dokumen terkait dengan data pengadaan. Layanan ini juga memungkinkan pengguna SPBE untuk melakukan proses validasi dan persetujuan pengadaan barang dan jasa pada lingkup internal instansi pemerintah pusat dan daerah. Namun Layanan Pengadaan belum memenuhi standar minimum untuk mendapatkan skor atau level 4 karena Sistem Pengadaan secara elektronik belum menyediakan layanan kolaborasi. Layanan kolaborasi ini merupakan layanan yang memungkinkan Layanan Pengadaan terintegrasi dengan layanan SPBE lain seperti Layanan Manajemen Keuangan atau Layanan Manajemen Perencanaan.

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, hasil dari tingkat kematangan (Lampiran T) dan wawancara (Lampiran U) yang dilakukan, dinas Kominfo Kabupaten Sumbawa sudah memiliki layanan transaksi yang memungkinkan pengguna layanan SPBE melakukan pengunggahan atau pengunduhan dokumen terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Pada layanan pengadaan ini juga memungkinkan pengguna SPBE untuk melakukan validasi atau proses persetujuan dari atasan mengenai pengadaan barang dan jasa dalam lingkup internal pemerintah pusat dan daerah. Hal ini didukung dengan penggunaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Kabupaten Sumbawa. LPSE sendiri adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik. UKPBJ/Pejabat Pengadaan pada Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang tidak memiliki Layanan Pengadaan Secara Elektronik dapat menggunakan fasilitas Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang terdekat dengan tempat kedudukannya untuk melaksanakan pengadaan secara elektronik. Selain memfasilitasi UKPBJ/Pejabat



Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik Layanan Pengadaan Secara Elektronik juga melayani registrasi penyedia barang dan jasa yang berdomisili di wilayah kerja Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang bersangkutan.

Dasar hukum pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah Pasal 73 Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang ketentuan teknis operasionalnya diatur oleh Peraturan Lembaga LKPP Nomor 14 Tahun 2018 tentang Layanan pengadaan Secara Elektronik. Layanan Pengadaan Secara Elektronik dalam menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik juga wajib memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lampiran V).

4.3 Hasil Penilaian Aspek 6 Pada Domain Layanan SPBE

Hasil penilaian untuk domain SPBE pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa dapat ditunjukkan dengan bentuk grafik batang dan tabel hasil penilaian dibawah ini. Dalam grafik batang yang merepresentasikan nilai dari setiap indikator pada aspek 6, sumbu X menunjukkan rentang nilai yang dapat diperoleh dari setiap indikator, mulai dari skor atau level 1 (sangat kurang) sampai skor atau level 5 (memuaskan) dan sumbu Y yang merepresentasikan seluruh indikator pada aspek 6 layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik. Grafik tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.2.



Gambar 4.1 Grafik Penilaian Aspek 6 Pada Domain Layanan SPBE



Tabel 4.8 Penilaian Aspek 6 Pada Layanan SPBE Yang Diteliti

No	Indikator	Skor Aspek 6		
		Skor	Yang diharapkan	Gap Analisis
1	Layanan Naskah Dinas	2	5	3
2	Layanan Manajemen Kepegawaian	3	5	2
3	Layanan Manajemen Perencanaan	3	5	2
4	Layanan Manajemen Penganggaran	3	5	2
5	Layanan Manajemen Keuangan	3	5	2
6	Layanan Manajemen Kinerja	3	5	2
7	Layanan Pengadaan	3	5	2
Rata-rata		2,80	5	2,20

Berdasarkan hasil penilaian menggunakan kerangka kerja Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang ditunjukkan pada tabel 4.8, didapatkan nilai rata rata untuk Aspek 6 Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Dinas Kominfo Kabupaten Sumbawa adalah 2,80 yang berarti baik dengan *gap analisis* bernilai 2,20.



BAB 5 PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil dari analisis data yang telah dilakukan, penulis akan menyusun beberapa rekomendasi yang nantinya diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi dalam melakukan perbaikan kualitas dari layanan *e-government* menggunakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa, terutama pada Dinas Kominfo yang menjadi *leader sector* dalam pengimplementasian *e-government* tersebut. Rekomendasi yang akan disusun dalam bentuk tabel pada setiap akhir pembahasan dari setiap Indikator yang ada pada Aspek 6 mengenai Layanan Administrasi Pemerintah Berbasis Elektronik di Domain 3 tentang Layanan SPBE diharapkan dapat mencapai skor atau level “Memuaskan” dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa.

Pada beberapa hal yang perlu dijelaskan kembali mengenai tingkat kematangan kapabilitas fungsi SPBE yang digunakan untuk melakukan penilaian terhadap implementasi *E-Government* di Pemerintah kabupater sumbawa. Tingkat kematangan kapabilitas fungsi SPBE ini merupakan salah satu dari dua tingkat kematangan yang ada pada kerangka kerja Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Tingkat kematangan kapabilitas fungsi SPBE sendiri merupakan tingkatan kematangan yang digunakan dalam domain layanan SPBE. Terdapat 5 tingkatan dalam tingkat kematangan kapabilitas Fungsi SPBE ini.

Tingkat kematangan tersebut adalah tingkatan informasi, tingkatan interaksi, tingkatan transaksi, tingkatan kolaborasi, dan tingkatan optimalisasi. Kelima tingkatan ini memiliki penilaian tersendiri terhadap pelaksanaan SPBE yang sedang dinilai. Untuk lebih detail mengenai pembahasan tersebut dapat dilihat kembali pada tabel 3.

5.1 Indikator 25 Layanan Naskah Dinas

Layanan Naskah Dinas adalah layanan yang memberikan suatu informasi dalam bentuk tertulis sebagai alat komunikasi yang sah dalam melaksanakan proses kedinasan. Layanan Naskah Dinas sendiri dibuat dan diterima oleh pejabat yang berwenang di lingkup Instansi pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan tugas pemerintahan dan pembangunan. Layanan Naskah Dinas dibuat dengan fungsi untuk memberikan manfaat dalam pengelolaan dokumen terkait naskah dinas.

Pada indikator 25 layanan naskah dinas, dinas Kominfo Kabupaten Sumbawa mendapatkan skor atau level 2, dimana yang berarti sistem dari layanan naskah dinas baru mencapai titik dimana sistem dapat berinteraksi dengan pengguna dari mulai pencarian informasi, dan mengunggah atau mengunduh dokumen dinas.

Namun pada dasarnya layanan naskah dinas masih memiliki layanan atau fungsi yang bisa di tingkatkan kembali, peningkatan atau penambahan fungsi yang dimaksud adalah untuk mempermudah atau memperluas fungsi dari layanan naskah dinas



sendiri. Sebagai contoh, layanan naskah dinas pada beberapa daerah lain sudah mencapai tahap dimana layanan naskah dinas dapat berinteraksi dengan pengguna SPBE, sampai dengan pengintegrasian layanan naskah dinas dengan Layanan SPBE lain Sehingga layanan naskah dinas sendiri dapat lebih optimal dalam segi pelayanan terhadap penggunaannya.

Rekomendasi perbaikan untuk Indikator layanan naskah dinas pada aspek 6 ini disusun pada Tabel 5.1

Tabel 5.1 Rekomendasi Target pada Layanan Naskah Dinas

No.	Rekomendasi	Target
1	Layanan Naskah Dinas harus menambahkan fungsi transaksi pada sistemnya, fungsi transaksi tersebut merupakan fungsi yang memungkinkan pengguna SPBE untuk melakukan Pengunggahan atau Pengunduhan dokumen terkait naskah dinas, serta memungkinkan terjadinya proses persetujuan dalam pengajuan cuti dari atasan dalam lingkup internal pemerintah pusat dan daerah.	Level 3
2	Layanan Naskah Dinas harus menambahkan layanan kolaborasi dimana layanan naskah dinas diintegrasikan dengan satu layanan SPBE lainnya, misal layanan naskah dinas diintegrasikan dengan layanan manajemen kepegawaian.	Level 4
3	Layanan Naskah Dinas harus bisa menambahkan fungsi Optimasi, fungsi Optimasi yang dimaksud merupakan suatu fungsi layanan naskah dinas yang memungkinkan pengguna SPBE untuk memberikan masukan dalam bentuk nilai atau pengembangan, sehingga layanan naskah dinas dapat menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.	Level 5

Tabel 5.1 menjelaskan bahwa Layanan Naskah Dinas dapat ditingkatkan dalam 3 tahap lanjutan yaitu level 3 (Transaksi), level 4 (Kolaborasi), dan level 5 (Optimalisasi). Untuk mencapai level 3, Layanan Naskah Dinas harus menambahkan layanan yang berkaitan dengan transaksi data yang memungkinkan pengguna SPBE untuk melakukan Pengunggahan atau Pengunduhan dokumen terkait naskah dinas, serta memungkinkan terjadinya proses persetujuan dalam pengajuan cuti dari atasan dalam lingkup internal pemerintah pusat dan daerah.

Untuk mencapai level 4 (Kolaborasi), Layanan Naskah Dinas harus menambahkan layanan kolaborasi dimana Layanan Naskah Dinas dapat diintegrasikan dengan



layanan lainnya, seperti Layanan Naskah Dinas diintegrasikan dengan layanan kepegawaian atau dengan layanan SPBE Instansi Pemerintahan lain.

Untuk mencapai level 5 (Optimalisasi) Layanan Naskah Dinas harus bisa menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi. Misal jika system dari Layanan Naskah Dinas ingin ditingkatkan sehingga system Layanan Naskah Dinas dapat berintegrasi dengan Layanan kepegawaian, system Layanan Naskah Dinas tidak perlu mengganti system yang sudah ada, namun hanya melakukan penambahan pada system yang sudah ada sehingga system yang diinginkan dapat berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan fungsi atau kebutuhan penggunaannya.

5.2 Indikator 26 Layanan Manajemen Kepegawaian

Layanan Manajemen Kepegawaian merupakan Layanan yang terbentuk dari berbagai proses pengolahan data kepegawaian, hal ini dilakukan dengan harapan hasil pengolahan data tersebut dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien sehingga proses yang akan dilakukan secara berkelanjutan akan tetap dalam kualitas yang optimal. Layanan Manajemen Kepegawaian ini juga berperan penting dalam memberikan manfaat pengolahan data kepegawaian pada lingkup instansi pemerintah pusat dan daerah.

Pada indikator 26 Layanan Manajemen Kepegawaian, dinas Kominfo Kabupaten Sumbawa mendapatkan skor atau level 3 (baik), yang berarti sistem dari layanan manajemen kepegawaian sudah mencapai titik dimana sistem dapat berinteraksi dengan pengguna mulai dari proses mengunduh atau mengunggah dokumen yang berkaitan dengan kepegawaian atau melakukan proses persetujuan dengan atasan seperti proses pengajuan cuti dalam lingkup instansi pemerintah pusat dan daerah.

Walaupun sudah tergolong baik, layanan manajemen kepegawaian masih dapat ditingkatkan kembali guna mempercepat atau mempermudah penggunaannya. Peningkatan layanan manajemen kepegawaian yang dimaksud dapat dilihat pada tabel rekomendasi 5.2



Tabel 5.2 Rekomendasi Target pada Layanan Manajemen Kepegawaian

No.	Rekomendasi	Target
1	Sistem dari Layanan Manajemen Kepegawaian harus menambahkan fungsi kolaborasi. Fungsi ini bertujuan untuk memungkinkan layanan manajemen kepegawaian dapat diintegrasikan dengan layanan SPBE yang lain seperti layanan manajemen keuangan.	Level 4
2	Sistem Layanan Manajemen Kepegawaian harus menambahkan fungsi Optimasi. Fungsi optimasi ini merupakan layanan yang memungkinkan pengguna dapat memberikan suatu penilaian atau pengembangan kedalam sistem, sehingga layanan manajemen kepegawaian dapat menyesuaikan layanannya terhadap perubahan lingkungan dan kebutuhan dari pengguna SPBE dalam lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah.	Level 5

Untuk mencapai level 4 (Kolaborasi), Layanan Manajemen Kepegawaian harus menambahkan layanan kolaborasi dimana Layanan Manajemen Kepegawaian dapat berintegrasikan dengan Layanan lainnya, seperti Layanan Manajemen Kepegawaian diintegrasikan dengan Layanan Naskah Dinas atau dengan layanan SPBE Instansi Pemerintahan lain.

Untuk mencapai level 5 (Optimalisasi) Layanan Manajemen Kepegawaian harus bisa menambahkan fungsi Optimasi. Fungsi optimasi ini merupakan layanan yang memungkinkan pengguna dapat memberikan suatu penilaian atau pengembangan kedalam sistem, sehingga layanan manajemen kepegawaian dapat menyesuaikan layanannya terhadap perubahan lingkungan dan kebutuhan dari pengguna SPBE dalam lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah.

5.3 Indikator 27 Layanan Manajemen Perencanaan

Layanan Manajemen Perencanaan merupakan Layanan yang terdiri dari beberapa proses pengolahan data terkait perencanaan yang bertujuan untuk mendapatkan hasil perencanaan yang efektif dan efisien. Layanan Manajemen Perencanaan juga merupakan layanan yang berperan penting dalam pengolahan data perencanaan dalam Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah.

Pada indikator 27 layanan manajemen perencanaan, dinas Kominfo Kabupaten Sumbawa mendapatkan skor atau level 3 (baik), yang berarti sistem dari layanan manajemen perencanaan sudah mencapai titik dimana sistem dapat berinteraksi



dengan pengguna. Interaksi yang dimaksud merupakan layanan yang diberikan oleh Layanan Manajemen Perencanaan sehingga penggunaanya dapat melakukan pengunduhan atau pengunggahan dokumen terkait dengan perencanaan kegiatan dan layanan ini juga memungkinkan pengguna SPBE untuk melakukan proses persetujuan dalam Perencanaan kegiatan oleh atasan dalam lingkup internal Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah.

Walaupun sudah tergolong baik, layanan manajemen perencanaan masih dapat ditingkatkan kembali guna mempercepat atau mempermudah penggunaanya. Peningkatan layanan manajemen perencanaan yang dimaksud dapat dilihat pada tabel rekomendasi 5.3

Tabel 5.3 Rekomendasi Target pada Layanan Manajemen Perencanaan

No.	Rekomendasi	Target
1	Sistem Layanan Manajemen Perencanaan harus bisa menyediakan layanan kolaborasi. Layanan kolaborasi yang dimaksud merupakan suatu layanan yang memungkinkan layanan manajemen perencanaan berintegrasi dengan layanan SPBE yang lain, seperti layanan manajemen kepegawaian atau layanan lainnya.	Level 4
2	Sistem Layanan Manajemen Perencanaan harus bisa menambahkan fungsi Optimasi, fungsi optimasi ini memungkinkan pengguna SPBE untuk memberikan penilaian atau peningkatan terhadap sistem sehingga layanan manajemen perencanaan dapat menyesuaikan dengan perubahan lingkungan dan kebutuhan instansi pemerintah pusat dan daerah.	Level 5

Untuk mencapai level 4 (Kolaborasi), Layanan Manajemen Perencanaan harus menambahkan layanan kolaborasi dimana Layanan Manajemen Perencanaan dapat diintegrasikan dengan Layanan lainnya, seperti Layanan Manajemen Perencanaan diintegrasikan dengan Layanan Manajemen Kepegawaian atau dengan layanan SPBE Instansi Pemerintahan lainnya.

Untuk mencapai level 5 (Optimalisasi), Layanan Manajemen Perencanaan harus bisa menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi. Misal jika system dari Layanan Manajemen Perencanaan ingin ditingkatkan sehingga system Layanan Manajemen Perencanaan dapat berintegrasi dengan Layanan Manajemen Kepegawaian, system Layanan Manajemen Perencanaan tidak perlu mengganti system yang sudah ada, namun hanya melakukan penambahan pada system yang sudah ada, sehingga system yang diinginkan dapat berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan fungsi atau kebutuhan penggunaanya.



5.4 Indikator 28 Layanan Manajemen Penganggaran

Layanan Manajemen Penganggaran merupakan layanan yang terdiri dari beberapa proses pengolahan data terkait penganggaran. Layanan ini juga bertujuan untuk memberikan hasil pengolahan data penganggaran yang lebih efektif dan efisien. Layanan Manajemen Penganggaran juga merupakan layanan yang diharapkan dapat memberikan manfaat pengolahan data penganggaran yang baik untuk instansi pemerintah pusat dan daerah.

Pada indikator 28 layanan manajemen penganggaran, dinas Kominfo Kabupaten Sumbawa mendapatkan skor atau level 3 (baik), yang berarti sistem dari layanan manajemen penganggaran sudah mencapai titik dimana sistem dapat berinteraksi dengan pengguna mulai dari layanan yang memungkinkan pengguna SPBE untuk melakukan pengunggahan atau pengunduhan dokumen terkait penganggaran serta layanan yang memberikan proses persetujuan penganggaran dari atasan dalam lingkup internal pemerintah pusat dan daerah.

Walaupun sudah tergolong baik, layanan manajemen penganggaran masih dapat ditingkatkan kembali guna mempercepat atau mempermudah penggunaannya. Peningkatan layanan manajemen penganggaran yang dimaksud dapat dilihat pada tabel rekomendasi 5.4

Tabel 5.4 Rekomendasi Target pada Layanan Manajemen Penganggaran

No.	Rekomendasi	Target
1	Sistem Layanan Manajemen Penganggaran harus bisa menambahkan fungsi kolaborasi. Fungsi kolaborasi yang dimaksud merupakan fungsi dari layanan yang memungkinkan Layanan Manajemen Penganggaran untuk berintegrasi dengan layanan SPBE lain seperti Layanan Perencanaan atau layanan SPBE lainnya.	Level 4
2	Sistem Layanan Manajemen Penganggaran harus bisa menambahkan fungsi Optimasi. Fungsi Optimasi yang dimaksud merupakan layanan yang memungkinkan pengguna SPBE memberikan penilaian atau Peningkatan terhadap Layanan Manajemen Penganggaran. Hal tersebut dapat membuat Layanan Manajemen Penganggaran beradaptasi terhadap perubahan lingkungan dan kebutuhan instansi pemerintah.	Level 5

Untuk mencapai level 4 (Kolaborasi), Layanan Manajemen Penganggaran harus menambahkan layanan kolaborasi dimana Layanan Manajemen Penganggaran dapat



diintegrasikan dengan Layanan lainya, seperti Layanan Manajemen Penganggaran diintegrasikan dengan Layanan Manajemen Perencanaan atau dengan layanan SPBE Instansi Pemerintahan lainnya.

Untuk mencapai level 5 (Optimalisasi), Layanan Manajemen Penganggaran harus bisa menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi. Misal jika system dari Layanan Manajemen Penganggaran ingin ditingkatkan sehingga system Layanan Manajemen Penganggaran dapat berintegrasi dengan Layanan Manajemen Perencanaan, system Layanan Manajemen Penganggaran tidak perlu mengganti system yang sudah ada, namun hanya melakukan penambahan pada system yang sudah ada, sehingga system yang diinginkan dapat berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan fungsi atau kebutuhan penggunaanya.

5.5 Indikator 29 Layanan Manajemen Keuangan

Layanan Manajemen Keuangan merupakan Layanan yang terdiri dari beberapa proses Pengolahan data keuangan. Layanan Manajemen Keuangan sendiri diharapkan dapat memberikan hasil pengolahan data terkait keuangan yang lebih efektif dan efisien. Layanan Manajemen Keuangan juga diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik dari hasil pengolahan data keuangan tersebut pada instansi pemerintah pusat dan daerah.

Pada indikator 29 Layanan Manajemen Keuangan, dinas Kominfo Kabupaten Sumbawa mendapatkan skor atau level 3 (baik), yang berarti sistem dari layanan manajemen keuangan sudah mencapai titik dimana sistem dapat berinteraksi dengan pengguna mulai dari memberikan layanan pengunggahan atau pengunduhan dokumen terkait keuangan, sampai layanan yang memungkinkan pengguna SPBE untuk melakukan proses persetujuan keuangan dari atasan dalam lingkup instansi pemerintah pusat dan daerah.

Walaupun sudah tergolong baik, layanan manajemen keuangan masih dapat ditingkatkan kembali guna mempercepat atau mempermudah penggunaanya. Peningkatan layanan manajemen keuangan yang dimaksud dapat dilihat pada tabel rekomendasi 5.5



Tabel 5.5 Rekomendasi Target pada Layanan Manajemen keuangan

No.	Rekomendasi	Target
1	Sistem Layanan Manajemen Keuangan harus bisa menambahkan fungsi Kolaborasi. Fungsi kolaborasi yang dimaksud merupakan fungsi yang memungkinkan Layanan manajemen Keuangan berintegrasi dengan layanan SPBE lain seperti dengan Layanan Manajemen Penganggaran.	Level 4
2	Sistem Layanan Manajemen Keuangan harus bisa menambahkan fungsi Optimasi. Fungsi Optimasi yang dimaksud merupakan fungsi yang memungkinkan Pengguna Layanan SPBE dapat memberikan penilaian atau peningkatan pada Sistem Layanan Manajemen Keuangan sehingga Layanan Manajemen Keuangan mampu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan dan kebutuhan instansi pemerintah.	Level 5

Untuk mencapai level 4 (Kolaborasi), Layanan Manajemen Keuangan harus menambahkan layanan kolaborasi dimana Layanan Manajemen Keuangan dapat diintegrasikan dengan Layanan lainya, seperti Layanan Manajemen Keuangan diintegrasikan dengan Layanan Manajemen Kepegawaian atau dengan layanan SPBE Instansi Pemerintahan lainnya seperti Kementrian Keuangan.

Untuk mencapai level 5 (Optimalisasi), Layanan Manajemen Keuangan harus bisa menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi. Misal jika system dari Layanan Manajemen Keuangan ingin ditingkatkan sehingga system Layanan Manajemen Keuangan dapat berintegrasi dengan Layanan Manajemen Kepegawaian, system Layanan Manajemen Keuangan tidak perlu mengganti system yang sudah ada, namun hanya melakukan penambahan pada system yang sudah ada, sehingga system yang diinginkan dapat berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan fungsi atau kebutuhan penggunaanya.

5.6 Indikator 30 Layanan Manajemen Kinerja

Layanan Manajemen Kinerja merupakan Layanan yang terdiri dari beberapa proses pengolahan sasaran dari unit atau organisasi instansi pemerintah secara konsisten. Layanan Manajemen Kinerja juga diharapkan dapat memastikan bahwa semua sasaran yang sudah direncanakan oleh unit atau organisasi pemerintah dapat dicapai dengan maksimal, efektif, dan efisien.



Pada indikator 30 Layanan Manajemen Kinerja, dinas Kominfo Kabupaten Sumbawa mendapatkan skor atau level 3 (baik), yang berarti sistem dari layanan manajemen kinerja sudah mencapai titik dimana sistem layanan manajemen kinerja dapat memberikan layanan yang memungkinkan pengguna SPBE untuk melakukan pengunggahan atau pengunduhan dokumen terkait dengan kinerja pegawai, serta dapat melakukan proses persetujuan kinerja oleh atasan dalam lingkup internal instansi pemerintah pusat dan daerah.

Walaupun sudah tergolong baik, layanan manajemen kinerja masih dapat ditingkatkan kembali guna mempercepat atau mempermudah penggunaannya. Peningkatan layanan manajemen kinerja yang dimaksud dapat dilihat pada tabel rekomendasi 5.6

Tabel 5.6 Rekomendasi Target pada Layanan Manajemen kinerja

No.	Rekomendasi	Target
1	Sistem Layanan Manajemen Kinerja harus bisa menambahkan fungsi Kolaborasi, fungsi Kolaborasi sendiri merupakan fungsi yang memungkinkan layanan manajemen kinerja dapat berintegrasi dengan layanan SPBE lain seperti layanan penganggaran atau layanan SPBE lainnya.	Level 4
2	Sistem Manajemen Kinerja harus dapat terus ditingkatkan dengan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi	Level 5

Untuk mencapai level 4 (Kolaborasi), Layanan Manajemen Kinerja harus menambahkan layanan kolaborasi dimana Layanan Manajemen Kinerja dapat diintegrasikan dengan Layanan lainnya, seperti Layanan Manajemen Kinerja diintegrasikan dengan Layanan Manajemen Penganggaran atau dengan layanan SPBE Instansi Pemerintahan lainnya.

Untuk mencapai level 5 (Optimalisasi), Layanan Manajemen Kinerja harus bisa menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi. Misal jika system dari Layanan Manajemen Kinerja ingin ditingkatkan sehingga system Layanan Manajemen Kinerja dapat berintegrasi dengan Layanan Manajemen Penganggaran, system Layanan Manajemen Kinerja tidak perlu mengganti system yang sudah ada, namun hanya melakukan penambahan pada system yang sudah ada, sehingga system yang diinginkan dapat berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan fungsi atau kebutuhan penggunaannya.



5.7 Indikator 31 Layanan Pengadaan

Layanan Pengadaan merupakan layanan yang terbentuk dari beberapa proses pengolahan data terkait dengan pemenuhan kebutuhan barang dan jasa dalam lingkup internal. Layanan Pengadaan sendiri diharapkan dapat menghasilkan data terkait pengadaan barang dan jasa yang lebih efektif dan efisien sehingga memberikan manfaat yang baik bagi instansi pemerintah pusat dan daerah.

Pada indikator 31 Layanan Pengadaan, dinas Kominfo Kabupaten Sumbawa mendapatkan skor atau level 3 (baik), yang berarti sistem dari layanan Pengadaan sudah mencapai titik dimana Sistem Layanan Pengadaan memiliki layanan yang memungkinkan pengguna SPBE untuk melakukan pengunduhan dan pengunggahan dokumen terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Layanan ini juga memungkinkan pengguna SPBE untuk melakukan proses persetujuan dari atasan instansi pemerintah yang terkait.

Walaupun sudah tergolong baik, layanan Pengadaan masih dapat ditingkatkan kembali guna mempercepat atau mempermudah penggunaannya. Peningkatan layanan Pengadaan yang dimaksud dapat dilihat pada tabel rekomendasi 5.7.

Tabel 5.7 Rekomendasi Target pada Layanan Pengadaan

No.	Rekomendasi	Target
1	Sistem Layanan Pengadaan harus memberikan layanan kolaborasi. Layanan kolaborasi yang dimaksud merupakan layanan yang memungkinkan Layanan Pengadaan berintegrasi dengan layanan SPBE lain seperti Layanan Manajemen Perencanaan atau layanan SPBE lainnya.	Level 4
2	Sistem Layanan Pengadaan harus menambahkan fungsi Optimasi. Fungsi Optimasi tersebut merupakan fungsi yang memungkinkan pengguna SPBE untuk memberikan nilai atau peningkatan terhadap sistem layanan pengadaan. hal tersebut dapat membuat Layanan Pengadaan bisa menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan dan kebutuhan penggunaannya.	Level 5



Untuk mencapai level 4 (Kolaborasi), Layanan Pengadaan harus menambahkan layanan kolaborasi dimana Layanan Pengadaan dapat diintegrasikan dengan Layanan lainnya, seperti Layanan Pengadaan diintegrasikan dengan Layanan Manajemen Penganggaran atau dengan layanan SPBE Instansi Pemerintahan lainnya.

Untuk mencapai level 5 (Optimalisasi), Layanan Pengadaan harus bisa menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi. Misal jika system dari Layanan Pengadaan ingin ditingkatkan sehingga system Layanan Pengadaan dapat berintegrasi dengan Layanan Manajemen Penganggaran, system Layanan Pengadaan tidak perlu mengganti system yang sudah ada, namun hanya melakukan penambahan pada system yang sudah ada, sehingga system yang diinginkan dapat berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan fungsi atau kebutuhan penggunaannya.



BAB 6 PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Dari hasil penilaian penerapan *e-government* di dinas Kominfo Kabupaten Sumbawa yang berfokus pada Aspek 6 Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik menggunakan kerangka kerja Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil penilaian penerapan *e-government* untuk Dinas Kominfo menggunakan SPBE didapatkan nilai 2,80 yang berarti Baik.
2. Penilaian untuk masing-masing Indikator pada Aspek 6 yang diteliti adalah sebagai berikut:
 - a. Indikator 25 Layanan Naskah Dinas mendapatkan skor 2 yang berarti Cukup.
 - b. Indikator 26 Layanan Manajemen Kepegawaian mendapatkan skor 3 yang berarti Baik.
 - c. Indikator 27 Layanan Manajemen Perencanaan mendapatkan skor 3 yang berarti Baik.
 - d. Indikator 28 Layanan Manajemen Penganggaran mendapatkan skor 3 yang berarti Baik.
 - e. Indikator 29 Layanan Manajemen Keuangan mendapatkan skor 3 yang berarti Baik.
 - f. Indikator 30 Layanan Manajemen Kinerja mendapatkan skor 3 yang berarti Baik.
 - g. Indikator 31 Layanan Pengadaan mendapatkan skor 3 yang berarti Baik.
3. Untuk melakukan perbaikan penerapan *e-government* pada Aspek 6 yang diteliti, disusun beberapa rekomendasi perbaikan berdasarkan kerangka kerja SPBE sebagaimana sudah penulis jabarkan pada bab 5 Pembahasan yang intinya merupakan rekomendasi dari segi layanan administrasi pemerintahan harus bisa berkolaborasi dengan layanan-layanan administrasi pemerintahan yang lain untuk meningkatkan kualitas dari layanan administrasi pemerintahan tersebut.

6.2 Saran

Penilaian pada penelitian ini bisa dilanjutkan untuk mengetahui hasil dari penerapan SPBE pada Domain kebijakan internal SPBE dan domain tata kelola SPBE. Diharapkan dengan dilanjutkannya penelitian ini dapat menghasilkan nilai yang lebih presisi terhadap penilaian penerapan *e-government* pada instansi Pemerintah Kabupaten Sumbawa atau pada instansi pemerintah lainnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Agarwal, Ritu & Sambamurthy, V. 2002. *Principles and Models for Organizing the IT Function*. MIS Quarterly Executive Vol. 1 No. 1.
- Alhomod, S. M. & Shafi, Mohd Mudasir. 2012. *Best Practice in E-government: A review of Some Innovative Models Proposed in Different Countries*. International Journal of Electrical & Computer Science IJECS-IJENS, vol: 12, no 01.
- Anjani, Ratna Dwi, Dkk., 2019. *Evaluasi Tingkat Kesiapan Pemerintah Kota Batu Dalam Menerapkan Pemerintahan Berbasis Elektronik (E-Government) Dengan Menggunakan ICT Readiness*. Malang: Universitas Brawijaya
- Bimasakti, Firman., 2018. *Tatakelola Pemerintahan Berbasis Electronic Government di Kabupaten Semarang*. S1. Universitas Diponegoro.
- Brewer, Agustinus., 2016. *Penelitian Kualitatif Metodologi, Desain dan Teknik Analisis Data dengan Nvivo 11 Plus*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Faturrahman, Ridho., 2018. *Evaluasi Penerapan E-Government di Pemerintah Kota Batu Menggunakan Kerangka Kerja Pemeringkatan E-Government Indonesia (PEGI)*. S1. Universitas Brawijaya.
- Gammahendra, Fianda., Hamid Djamhur & Riza M.F., 2014. *Pengaruh Struktur Organisasi terhadap Efektivitas Organisasi (Studi Pada Persepsi Pegawai Tetap Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kediri)*. Jurnal Administrasi Bisnis (JAB). Vol. 7 No. 2.
- Hartanti, Indah., 2018. *Framework COBIT 4.1 Untuk Audit Sistem Informasi pada Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi ABCD*. Bandar Lampung: STMIK Mitra Lampung
- Hasibuan, Z.A & Santoso, H.B., 2005. *Standarisasi Aplikasi E-Government Untuk Instansi Pemerintah. Prosiding Konferensi Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi Indonesia*.
- Hernikawati, Dewi & Sensuse, Dana Indra. 2013. *Uji Validitas Indikator-Indikator Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI) Tingkat Provinsi Dengan Analisis Faktor*. Jurnal Penelitian Pos dan Informatika, vol 6, no 1, 2016.
- Indrajit, R.E.I., 2006. *Electronic Government Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayan Publik Berbasis Teknologi Digital*. Andi: Yogyakarta.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika RI., 2007. *Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 41 Tahun 2007 Tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional*. Jakarta.



Kementerian Komunikasi dan Informatika RI., 2013. *Peraturan Menteri Kominfo No.7 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penerapan Interoperabilitas Dokumen Perkantoran Bagi Penyelenggara Sistem Elektronik Untuk Pelayanan Publik*. Jakarta.

Kementerian Komunikasi dan Informatika RI., 2013. *Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Tentang Pedoman Teknis Pusat Data*. Jakarta.

Kementerian Komunikasi dan Informatika RI., 2017. *Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Tentang Penyelenggaraan Portal Dan Situs Web Badan Pemerintahan*. Jakarta.

Kemertrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI., 2015. *Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Jakarta.

Kodoatie, Robert J., 2005. *Pengantar Manajemen Infrastruktur*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Lanvin, Bruno., 2002. *The E-government Handbook for Developing Countries*. The World Bank.

Petersen, Rodney J., 2004. *A Framework for IT Policy Development* <https://er.educause.edu/articles/2004/1/a-framework-for-it-policy-development>.

Presiden Republik Indonesia., 2003. *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan E-government*. Instruksi Presiden. Jakarta

Simatupang, Pantjar. 2003. Analisis Kebijakan: Konsep Dasar dan Prosedur Pelaksanaan. Analisis Kebijakan Pertanian Volume 1, No 1, Maret 2003, hlm 1-21.

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Sutabri, Tata. 2012. *Konsep Sistem Informasi*. Jakarta: Penerbit Andi.

Widyantini, Rini. 2018. *Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.



LAMPIRAN B HASIL WAWANCARA DATA INDIKATOR 25

LAYANAN NASKAH DINAS PADA ASPEK 6 SPBE

Nama : Rahman Ansori, S. Sos. M. SE

Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Sumbawa Besar

1. Apakah Instansi di Kabupaten Sumbawa Besar memiliki sistem naskah dinas elektronik?

Jawab:

Iya, contoh aplikasinya adalah aplikasi disposisi surat dinas online yang kita gunakan adalah siMAYA dimana aplikasi tersebut sudah memiliki fitur surat masuk, disposisi surat, dan pengarsipan berkas.

2. Apakah sistem naskah dinas elektronik instansi di Kabupaten Sumbawa Besar diberikan dalam bentuk informasi satu arah?

Jawab:

Tidak, layanan naskah dinas kami sudah sampai tahap interaksi.

3. Apakah sistem naskah dinas elektronik instansi di Kabupaten Sumbawa Besar menyediakan layanan interaksi seperti pencarian informasi, pengiriman e-dokumen, dan penerimaan e-dokumen?

Jawab:

Iya, layanan naskah dinas Kabupaten Sumbawa Besar sudah memiliki fitur pencarian informasi, pengiriman (unggah) e-dokumen, dan penerimaan (unduh) e-dokumen seperti surat undangan, surat disposisi, dan surat resmi.

4. Apakah sistem naskah dinas elektronik instansi di Kabupaten Sumbawa Besar memiliki layanan transaksi seperti mekanisme persetujuan dan penyetoran tanda tangan digital?

Jawab:

Belum, sampai saat ini untuk mekanisme persetujuan dan tanda tangan digital belum tersedia secara online, masih dilakukan dengan cara manual.



5. Apakah sistem naskah dinas elektronik instansi di Kabupaten sumbawa besar memiliki layanan yang berkolaborasi dengan layanan SPBE yang lain?

Jawab:

Belum, untuk saat ini layanan naskah dinas masih terpisah dengan layanan SPBE yang lain.

6. Apakah sistem naskah dinas elektronik instansi di Kabupaten sumbawa besar dapat di perbaharui sesuai dengan keperluan dan perubahan lingkungan kerja?

Jawab:

Iya, layanan naskah dinas Kabupaten sumbawa pasti bisa diperbaharui mengikuti kepentingan dan perubahan lingkungan kerjanya.



Lampiran F Layanan Naskah Dinas

The screenshot displays the SIPAS interface with a sidebar on the left containing navigation options: Tugas, Masuk, Terkirim, Draft, Asistensi, and Logout. The main area shows a list of documents under the heading 'Terkirim' and 'MUAT ULANG'. The list includes details such as document type, sender, subject, and date.

No	Disposisi	Surat	Anhan	Tgl.Riwayat
1	Disposisi Masuk Eksternal	undangan sosialisasi covid Dari: pt. shobyte teknologi indonesia No Surat: 001/001/2020	MOHON PETUNJUK mohon petunjuk 1 orang	04 Jul 2020 22:27
2	Disposisi Masuk Eksternal	X2C2YCX Dari: kementerian agama No Surat: 21312m3n123n12n	MOHON SARAN saran 1 orang	27 Jun 2020 17:04
3	Disposisi Masuk Eksternal	undangan sosialisasi covid Dari: pt. shobyte teknologi indonesia No Surat: 001/001/2020	MOHON SARAN saran 2 orang	24 Jun 2020 08:53
4	Disposisi Masuk Eksternal	Perihal Dari: PT Indonesia Sejahtera No Surat: 12321	MOHON KEPUTUSAN mohon 1 orang	11 Jun 2020 20:21
5	Disposisi Masuk Eksternal	test 040306 Dari: null No Surat: 040306	MOHON KEPUTUSAN mohon 1 orang	04 Jun 2020 13:19
6	Disposisi Masuk Eksternal	test 040306 Dari: null No Surat: 040306	MOHON KEPUTUSAN mohon 1 orang	04 Jun 2020 13:19
7	Disposisi Masuk Eksternal	undangan sosialisasi covid Dari: pt. shobyte teknologi indonesia No Surat: 001/001/2020	MOHON KEPUTUSAN mohon 1 orang	04 Jun 2020 13:16
8	Disposisi Masuk Eksternal	undangan sosialisasi covid Dari: pt. shobyte teknologi indonesia No Surat: 001/001/2020	MOHON KEPUTUSAN mohon 1 orang	04 Jun 2020 13:16
9	Disposisi Masuk Eksternal	undangan sosialisasi covid Dari: pt. shobyte teknologi indonesia No Surat: 001/001/2020	MOHON KEPUTUSAN mohon 1 orang	04 Jun 2020 13:16

Page 1 of 9 | Displaying 1 - 25 of 222



LAMPIRAN E HASIL WAWANCARA DATA INDIKATOR 26

LAYANAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN PADA ASPEK 6 SPBE

Nama : Rudi Yulianto, SE, M.Sc., MAP

Jabatan : Kepala Seksi Aplikasi dan Tata Kelola E-Government Diskominfotik Kab. Sumbawa.

1. Apakah Instansi di Kabupaten Sumbawa Besar memiliki sistem Manajemen Kepegawaian?

Jawab:

Iya, kami menggunakan layanan yang sudah diberikan oleh badan kepegawaian negara (BKN) yang bernama SAPK.

2. Apakah sistem layanan manajemen kepegawaian instansi di Kabupaten Sumbawa Besar menyediakan informasi satu arah?

Jawab:

Iya, namun sistem manajemen kepegawaian Kabupaten Sumbawa sudah sampai tahap transaksi pada SPBE, jadi bukan hanya satu arah.

3. Apakah sistem layanan manajemen kepegawaian instansi di Kabupaten Sumbawa menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi kepegawaian dan mengunduh data diri kepegawaian?

Jawab:

Iya, namun layanan manajemen kepegawaiannya sudah sampai pada tahap transaksi.

4. Apakah sistem layanan manajemen kepegawaian instansi di Kabupaten Sumbawa menyediakan layanan transaksi seperti mekanisme persetujuan kenaikan pangkat dan pengajuan cuti?

Jawab:

Iya, layanan manajemen Kabupaten Sumbawa sudah memiliki layanan seperti mekanisme persetujuan kenaikan pangkat, pengajuan cuti, dokumen pegawai, dan lain sebagainya.



5. Apakah sistem layanan manajemen kepegawaian instansi di Kabupaten sumbawa menyediakan layanan yang berkolaborasi dengan layanan SPBE lain?

Jawab:

Belum, untuk saat ini layanan manajemen kepegawaian Kabupaten sumbawa masih terpisah dengan layanan SPBE yang lain.

6. Apakah sistem layanan manajemen kepegawaian instansi di Kabupaten sumbawa dapat ditingkatkan sesuai dengan lingkungan dan kebutuhan lain?

Jawab:

Iya, bisa di tingkatkan sesuai dengan kubutuhan kerja dan lingkungannya, namun tetap mengacu pada BKN terlebih dahulu.



Lampiran G Layanan Manajemen Kepegawaian





LAMPIRAN I HASIL WAWANCARA DATA INDIKATOR 27

LAYANAN MANAJEMEN PERENCANAAN PADA ASPEK 6 SPBE

Nama : Ir. Baiq Rahmi Iryana

Jabatan : Kepala Bidang Teknologi Informatika Diskominfotik Kab. Sumbawa

1. Apakah Instansi pemerintahan Kabupaten sumbawa besar memiliki sistem manajemen perencanaan?

Jawab:

Iya, sistem manajemen perencanaan Kabupaten sumbawa bernama SIMRENDA.

2. Apakah sistem layanan manajemen perencanaan instansi di Kabupaten sumbawa menyediakan informasi satu arah?

Jawab:

Iya, namun sistem layanan manajemen perencanaan di Kabupaten sumbawa sudah sampai pada tahap transaksi pada SPBE.

3. Apakah sistem layanan manajemen kepegawaian instansi di Kabupaten sumbawa menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi perencanaan instansi?

Jawab:

Iya, namun sistem layanan manajemen perencanaan Kabupaten sumbawa sudah sampai pada tahap transaksi pada SPBE.

4. Apakah sistem layanan manajemen kepegawaian instansi di Kabupaten sumbawa menyediakan layanan transaksi seperti persetujuan dan validasi perencanaan kegiatan internal instansi?

Jawab:

Iya, sistem manajemen perencanaan Kabupaten sumbawa sudah memiliki sejumlah layanan seperti mengunduh atau mengunggah informasi perencanaan kegiatan, dan mekanisme persetujuan dan validasi perencanaan kegiatan di internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.



5. Apakah sistem layanan manajemen kepegawaian instansi di Kabupaten sumbawa menyediakan layanan kolaborasi dengan layanan SPBE lain seperti berintegrasi dengan layanan manajemen kepegawaian?

Jawab:

Belum, untuk saat ini layanan manajemen perencanaan masih belum berkolaborasi dengan layanan SPBE lainnya.

6. Apakah sistem layanan manajemen perencanaan instansi di Kabupaten sumbawa dapat ditingkatkan sesuai dengan lingkungan dan kebutuhan kerja?

Jawab:

Iya, sistem layanan manajemen perencanaan Kabupaten sumbawa dapat ditingkatkan sesuai dengan lingkungan dan kebutuhan kerjanya.



Lampiran J Layanan Manajemen Perencanaan

SIMRENDA
SARAJENAN SUMBAWA

Terwujudnya
Layanan Perencanaan yang Andal,
Akuntabel dan Partisipatif

INFO, BENTRIK SAKSI, BERKEMBANG SAMA, RIKTO

ARTIKEL TERBARU

ISI DAN MOTTO BAPPEDA WATEN SUMBAWA
INCLUSIVE GROWTH - INCLUSIVE
DAN MOTTO BARRIS KAWUNTEH
K U S I. TERBUKTIKHA LARAKAN
SEKAR YANG ANJAL, AKUNTABEL DAN
IDP. Perencanaan yang Andal, Akuntabel dan Partisipatif

PENGUMUMAN

- 08** **ANJUK NUSA?**
08/08/2019
1 Pengumuman
- 07** **SIMRENDA DAPAT DIKASUS OLEH MASYARAKAT**
07/08/2019
MASYARAKAT DAUAT BERKASUS SIMRENDA MELALUI ID-AMI BAPPEDA DAU.
- 22** **BATAS WAKTU PENGABIAN USULAN POKIR**
22/08/2019
BATAS WAKTU PENGABIAN USULAN POKIR TANGGAL 30 AGUSTUS.

SIMRENDA
KABUPATEN SUMBAWA

Alamat:
Rencana Kabupaten Sumbawa,
Jl. Garuda No.104, Lingsari, Kec. Sumbawa,
Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat

Kontak:
Phone: 0371 23007
Email: sburawaweb@gmail.com

Auditor SIMRENDA adalah lembaga yang bertugas melaksanakan pemeriksaan internal pada instansi terkait. Pengoperasian Kabupaten Sumbawa



LAMPIRAN L HASIL WAWANCARA DATA INDIKATOR 28

LAYANAN MANAJEMEN PENGANGGARAN PADA ASPEK 6 SPBE

Nama : Heri Kusmanto, S. Sos.

Jabatan : Kepala Seksi Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informatika
Diskominfotik Kab. Sumbawa

1. Apakah instansi pemerintahan Kabupaten sumbawa besar memiliki sistem penganggaran?

Jawab:

Iya, layanan manajemen penganggaran Kabupaten sumbawa menggunakan sistem yang bernama SIMRENDA.

2. Apakah sistem layanan manajemen penganggaran instansi di Kabupaten sumbawa memiliki layanan informasi yang diberikan satu arah?

Jawab:

Tidak, pada manajemen penganggaran Kabupaten sumbawa sudah memiliki layanan informasi yang di berikan secara dua arah.

3. Apakah sistem layanan manajemen penganggaran instansi di Kabupaten sumbawa memiliki layanan interaksi seperti mencari dan mengunduh informasi terkait penganggaran?

Jawab:

Iya, sistem manajemen penganggaran Kabupaten sumbawa sudah memiliki layanan tersebut.

4. Apakah sistem layanan manajemen penganggaran instansi di Kabupaten sumbawa memiliki layanan transaksi seperti mekanisme persetujuan dan validasi penganggaran?

Jawab:



Iya, pada sistem layanan manajemen penganggaran Kabupaten sumbawa sudah memiliki layanan mekanisme persetujuan dan validasi penganggaran di internal Instansi Pemerintah.

5. Apakah sistem layanan manajemen penganggaran instansi di Kabupaten sumbawa memiliki layanan kolaborasi dengan layanan SPBE lain seperti berintegrasi dengan layanan manajemen perencanaan?

Jawab:

Belum, untuk saat ini sistem layanan manajemen penganggaran masih belum berkolaborasi dengan layanan SPBE lainnya, atau dengan SKPD lain.

6. Apakah sistem layanan manajemen penganggaran instansi di Kabupaten sumbawa dapat ditingkatkan sesuai dengan lingkungan dan kebutuhan kerja?

Jawab:

Iya, layanan manajemen penganggaran Kabupaten sumbawa dapat ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan kerja dan lingkungannya.



Lampiran M Layanan Manajemen Penganggaran

SIMRENDA
KABUPATEN SUMBAWA

Dashboard | Data Master | E-RUPD | E-RPH | E-Planning | E-Budgeting

E-Budgeting | APBD | Belanja Langsung

Rancangan APBD Belanja Langsung Murni

Tahun Anggaran: 2020

SKPD: --Pilih SKPD--

Uraian: --Tidak Ada Uraian--

Bidang: --Tidak Ada Bidang--

Tabel Rekapitulasi Rancangan APBD Belanja Langsung Murni					
Kode Rekening	Uraian	RKA (Rp.)	Rancangan APBD (Rp.)	Sisa (Rp.)	Ket.



LAMPIRAN 0 HASIL WAWANCARA DATA INDIKATOR 29

LAYANAN MANAJEMEN KEUANGAN PADA ASPEK 6 SPBE

Nama : H. Dony Tri Wardana, ST.

Jabatan : Kepala Seksi Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informatika
Diskominfotik Kab. Sumbawa.

1. Apakah instansi pemerintahan Kabupaten sumbawa besar memiliki sistem manajemen keuangan?

Jawab:

Iya, pada Kabupaten sumbawa layanan manajemen keuangan menggunakan aplikasi yang bernama SIMRENDA.

2. Apakah sistem layanan manajemen keuangan instansi di Kabupaten sumbawa memiliki layanan informasi yang diberikan secara satu arah?

Jawab:

Iya, namun sudah lebih dari satu arah.

3. Apakah sistem layanan manajemen keuangan instansi di Kabupaten sumbawa memiliki layanan interaksi seperti pencarian informasi terkait data keuangan?

Jawab:

Iya, pada pencarian lebih bisa di spesifikasikan berdasarkan kategori keuangan yang ingin di cari.

4. Apakah sistem layanan manajemen keuangan instansi di Kabupaten sumbawa memiliki sistem layanan transaksi seperti mekanisme persetujuan dari atasan dan validasi keuangan?

Jawab:

Iya, pada layanan manajemen keuangan Kabupaten sumbawa sudah memiliki sistem seperti mekanisme persetujuan dari atasan dan validasi keuangan di internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.



5. Apakah sistem layanan manajemen keuangan instansi di Kabupaten sumbawa memiliki sistem layanan yang berkolaborasi dengan layanan SPBE lain seperti berintegrasi dengan layanan manajemen kepegawaian?

Jawab:

Belum, pada saat ini layanan manajemen keuangan Kabupaten sumbawa belum dapat berkolaborasi dengan layanan SPBE lain atau dengan SKPD lainnya di Kabupaten sumbawa.

6. Apakah sistem layanan manajemen keuangan instansi di Kabupaten sumbawa dapat ditingkatkan sesuai dengan kondisi lingkungan dan kebutuhan kerja?

Jawab:

Iya, layanan manajemen keuangan Kabupaten sumbawa dapat ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan kerja dan lingkungannya.



Lampiran P Layanan Manajemen Keuangan

The screenshot displays the SIMRENDA (Sistem Informasi Manajemen RENCANA DAN PELAKSANAAN) web application for Kabupaten Sumbawa. The interface includes a navigation menu with options like Dashboard, Data Master, E-RSPD, E-RPM, E-Planning, and E-Performance. The main content area is titled 'Rangkuman Rancangan PPAS Terverifikasi' (Summary of Verified Budget Formulation) for the year 2018. It features a dropdown menu for SKPD (State-Owned Enterprises) and a 'Refresh' button. Below this, there are three buttons: 'Cetak Rangkuman Rancangan PPAS Terverifikasi' (Print Summary), 'Cetak Rangkuman Rancangan PPAS Terverifikasi (Format Permenbag)' (Print Summary in Permenbag Format), and a table header with columns: 'Kode Rekening' (Account Code), 'Uraian' (Description), and 'Plafon Anggaran Sementara (Rp)' (Temporary Budget Ceiling in Rp).



LAMPIRAN R HASIL WAWANCARA DATA INDIKATOR 30

LAYANAN MANAJEMEN KINERJA PADA ASPEK 6 SPBE

Nama : Heri Kusmanto, S. Sos.

Jabatan : Kepala Seksi Pengelolaan Sumberdaya Teknologi Informatika
Diskominfotik Kab. Sumbawa.

1. Apakah instansi pemerintahan Kabupaten sumbawa memiliki sistem manajemen kinerja?

Jawab:

Iya, pada Kabupaten sumbawa layanan manajemen kinerja menggunakan aplikasi e-sakip.

2. Apakah sistem layanan manajemen kinerja instansi di Kabupaten sumbawa memiliki sistem layanan informasi satu arah?

Jawab:

Iya, namun saat ini layanan yang diberikan sudah lebih dari satu arah.

3. Apakah sistem layanan manajemen kinerja instansi di Kabupaten sumbawa memiliki sistem layanan interaksi seperti pencarian informasi dan pengunggahan data kemajuan kinerja?

Jawab:

Iya, pada layanan manajemen kinerja Kabupaten sumbawa memiliki layanan tersebut.

4. Apakah sistem layanan manajemen kinerja instansi di Kabupaten sumbawa memiliki sistem layanan transaksi seperti persetujuan kinerja unit organisasi dari atasan dan validasi kinerja?

Jawab:

Iya, saat ini layanan manajemen kinerja Kabupaten sumbawa sudah sampai pada layanan mekanisme persetujuan kinerja unit organisasi dari atasan dan validasi kinerja di internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.



5. Apakah sistem layanan manajemen kinerja instansi di Kabupaten sumbawa memiliki sistem layanan kolaborasi dengan layanan SPBE lain seperti berintegrasi dengan layanan penganggaran?

Jawab:

Belum, untuk saat ini layanan manajemen kinerja Kabupaten sumbawa belum dapat berkolaborasi dengan layanan SPBE yang lain.

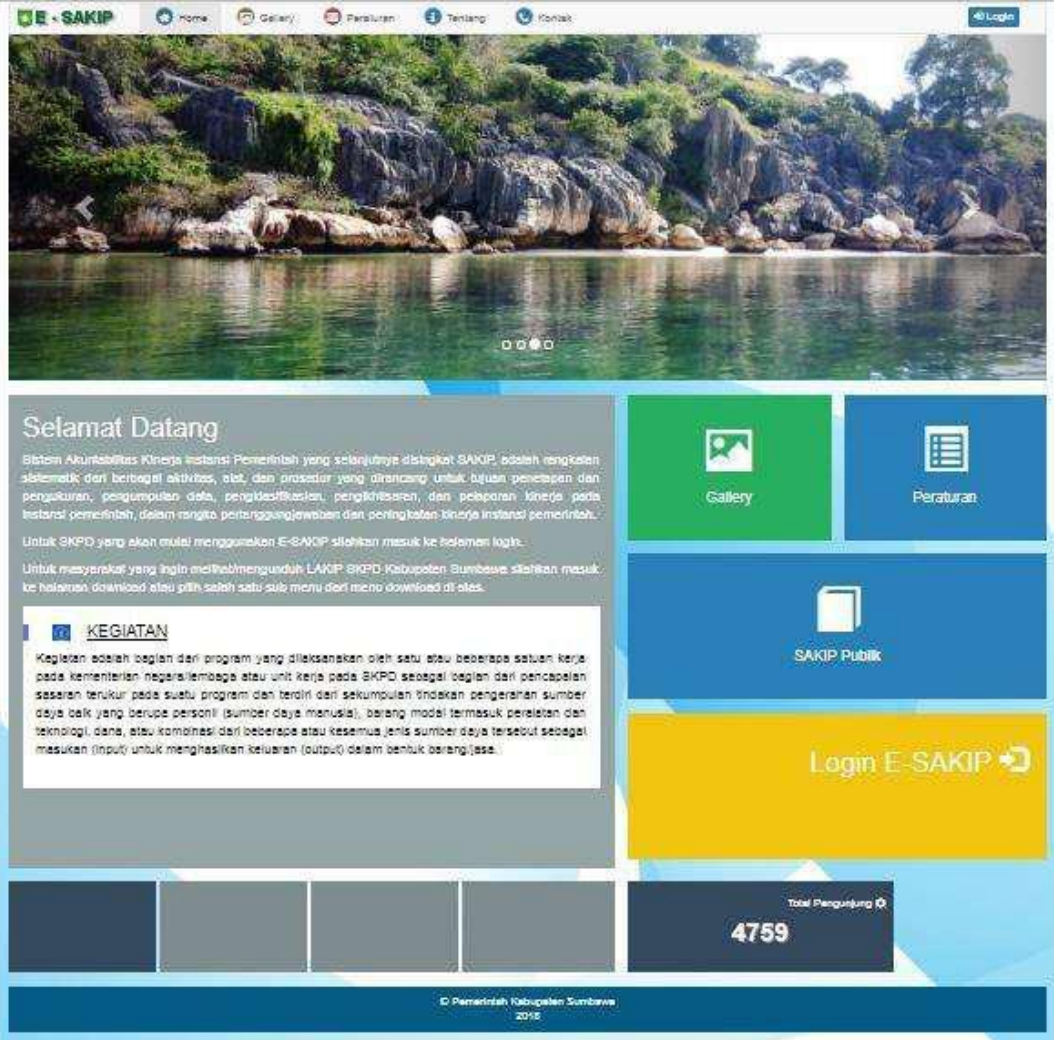
6. Apakah sistem layanan manajemen kinerja instansi di Kabupaten sumbawa dapat ditingkatkan sesuai dengan lingkungan dan kebutuhan instansi?

Jawab:

Iya, layanan manajemen kinerja Kabupaten sumbawa dapat ditingkatkan sesuai dengna lingkungan dan kebutuhan kerjanya.



Lampiran S Layanan Manajemen Kinerja





LAMPIRAN U HASIL WAWANCARA DATA INDIKATOR 31

LAYANAN PENGADAAN PADA ASPEK 6 SPBE

Nama : R. Rudi Yulianto, SE, M.Sc., MAP

Jabatan : Kepala Seksi Aplikasi dan Tata Kelola E-Government Diskominfotik Kab. Sumbawa.

1. Apakah instansi pemerintahan Kabupaten sumbawa memiliki sistem pengadaan secara elektronik?

Jawab:

Iya, pada Kabupaten sumbawa layanan pengadaan menggunakan aplikasi LPSE.

2. Apakah sistem layanan pengadaan instansi di Kabupaten sumbawa memiliki sistem layanan informasi satu arah?

Jawab:

Iya, namun saat ini layanan pengadaan sudah lebih dari satu arah.

3. Apakah sistem layanan pengadaan instansi di Kabupaten sumbawa memiliki sistem layanan interaksi seperti pencarian informasi terkait pengadaan?

Jawab:

Iya, layanan manajemen pengadaan Kabupaten sumbawa sudah memiliki layanan tersebut.

4. Apakah sistem layanan pengadaan instansi di Kabupaten sumbawa memiliki sistem layanan transaksi seperti mekanisme persetujuan dan validasi pada alur proses pengadaan?

Jawab:

Iya, sampai saat ini layanan pengadaan Kabupaten sumbawa sudah sampai pada tahap layanan seperti mekanisme persetujuan dan validasi pada alur proses pengadaan, verifikasi penyedia.



5. Apakah sistem layanan pengadaan instansi di Kabupaten sumbawa memiliki sistem layanan kolaborasi dengan layanan SPBE lain seperti berintegrasi dengan layanan keuangan?

Jawab:

Belum, untuk saat ini layanan pengadaan Kabupaten sumbawa belum dapat berkolaborasi dengan layanan SPBE lain.

6. Apakah sistem layanan pengadaan instansi di Kabupaten sumbawa memiliki sistem yang dapat ditingkatkan sesuai dengan lingkungan dan kebutuhan instansi?

Jawab:

Iya, layanan pengadaan Kabupaten sumbawa dapat di tingkatkan sesuai dengan lingkungan dan kebutuhan kerjanya.



Lampiran V Layanan Pengadaan

Tender

No	Nama Paket	HPS	Aktor Pendaftaran
Pengadaan Barang			
Jasa Konsultansi Badan Usaha			
1	Revisi Dokumen Kejar Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Perumahan Sumbawa Besar Agensi 4.5	Rp 249,5 Jt	08 Agustus 2019 22:59
Pengadaan Konstruksi			
1	Rehab Gedung Kantor LPT Penelitian dan Laboratorium Konstruksi Agensi 4.5	Rp 345,0 Jt	21 Juli 2019 22:59
Jasa Lainnya			
Jasa Konsultansi Perencanaan			

Non Tender

No	Nama Paket	HPS	Aktor Pendaftaran
Pengadaan Barang			
Jasa Konsultansi Badan Usaha			
Pengadaan Konstruksi			
Jasa Lainnya			
Jasa Konsultansi Perencanaan			

Pengumuman dan Berita

- 09 Juli 2019 12:55
POKJA PEMILIHAN 50 PEKERJAAN BARANG ;
PENGUMUMAN GAGAL TENDER PENGADAAN MESIN
PENGISUNG RADI (RUVI)
- 09 Juli 2019 12:55
POKJA PEMILIHAN 50 PEKERJAAN BARANG ;
PENGUMUMAN GAGAL TENDER PENGADAAN TRUK
RODA ENJAM JANG
- 02 Juli 2019 09:12
Pokjam 24 Konstruksi, Berita Acara Gagal Tender Pemb. Bar. UPT Puskesmas Mojo Mulu (DAK Reguler)
- 02 Juli 2019 11:08
Pokjam 26 Pekerjaan Barang 2A Gagal Tender/Pusing Roda Dua
- 26 Juni 2019 15:28
POKJAM 22 PEKERJAAN KONSTRUKSI PENGUMUMAN GAGAL TENDER REHAB KANTOR (KECAMATAN ALAS)
- 27 Juni 2019 15:12
POKJA PEMILIHAN 50 PEKERJAAN BARANG ;
PENGUMUMAN GAGAL TENDER PENGADAAN MESIN
PENGISUNG RADI (RUVI)
- 27 Juni 2019 15:08
POKJA PEMILIHAN 50 PEKERJAAN BARANG ;
PENGUMUMAN GAGAL TENDER PENGADAAN TRUK ;
RODA ENJAM
- 26 Juni 2019 16:19
PENGUMUMAN GAGAL TENDER PUSKESMAS LABUHAN
BADAS

Link Penting

Tender Non-Eproc



LAMPIRAN A HASIL EVALUASI LAYANAN SPBE INDIKATOR 25 LAYANAN NASKAH DINAS

Domain 3	Layanan SPBE	Aspek 6	Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	Pilihan Saudara
Indikator 25	Layanan Naskah Dinas	Pertanyaan	<i>Apakah Instansi Saudara memiliki system naskah dinas elektronik?</i>	
Level 0	Tidak terdapat system naskah dinas.			
Level 1	Sistem Naskah Dinas Elektronik hanya menyediakan diseminasi (penyebaran satu arah) informasi seperti surat undangan, surat disposisi, dan surat resmi.			
Level 2	Sistem Naskah Dinas Elektronik menyediakan layanan interaksi seperti pencarian informasi, pengiriman (unggah) e-dokumen, dan penerimaan (unduh) e-dokumen seperti surat undangan, surat disposisi, dan surat resmi.			
Level 3	Sistem Naskah Dinas Elektronik Menyediakan layanan Transaksi dimana pengguna dapat mengunggah e-dokumen dan memasukkan informasi ke dalam system, dan system dapat merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan, penyematan tanda tangan digital dan pengiriman e-dokumen ke tujuan penerima di internal instansi pusat/ pemerintah daerah.			
Level 4	Sistem naskah dinas elektronik menyediakan layanan kolaborasi dimana layanan persuratan diintegrasikan dengan suatu layanan SPBE misalnya layanan manajemen kepegawaian atau diintegrasikan dengan SPBE instansi pemerintah lain.			
Level 5	Sistem Naskah Dinas Elektronik dapat terus ditingkatkan dengan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan.			
Penjelasan :				
Data Pendukung :				



Penjelasan Indikator :

- a) Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan diterima oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan;
- b) Layanan Naskah Dinas merupakan tugas atau fungsi yang memberikan manfaat dalam pengelolaan naskah dinas;
- c) Sistem Naskah Dinas Elektronik dimaksud adalah suatu layanan naskah dinas berbasis elektronik.

Penjelasan masing-masing tingkat kematangan:

Level 0 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum memiliki sistem naskah dinas.

Level 1 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki sistem naskah dinas yang menyediakan layanan diseminasi informasi yang bersifat satu arah ke pengguna layanan misalnya informasi tentang surat undangan, surat disposisi, dan surat resmi.

Level 2 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki sistem naskah dinas elektronik menyediakan layanan interaksi seperti pencarian informasi, pengiriman (unggah) e-dokumen, dan penerimaan (unduh) e-dokumen berupa surat undangan, surat disposisi, dan surat resmi.

Level 3 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah memiliki sistem naskah dinas elektronik yang menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunggah e-dokumen dan memasukkan data/informasi ke dalam sistem, dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan, penyematan tanda tangan digital dan pengiriman e-dokumen ke tujuan penerima di lingkungan internal.

Level 4= Instansi Pusat/Pemerintah Daerah memiliki sistem naskah dinas elektronik yang menyediakan layanan kolaborasi dimana layanan persuratan sudah dapat berkolaborasi dengan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lainnya.

Level 5 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki sistem naskah dinas elektronik yang dapat ditingkatkan/dikembangkan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.



Data pendukung dapat berupa dokumen penggunaan aplikasi, *screenshot* layanan aplikasi, daftar layanan dan fitur aplikasi, arsitektur aplikasi, pengelolaan repositori API, unit kerja yang menangani manajemen layanan, dan bukti terkait lainnya. Apabila lebih dari satu file, maka nama file ditambahkan huruf seperti indikator25a.pdf, indikator25b.pdf, indikator25c.pdf, dan seterusnya.



**LAMPIRAN D HASIL EVALUASI LAYANAN SPBE INDIKATOR 26
LAYANAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN**

Domain 3	Layanan SPBE	Aspek 6	Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	Pilihan Saudara
Indikator 26	Layanan Manajemen Kepegawaian	Pertanyaan	<i>Apakah Instansi Saudara memiliki system manajemen kepegawaian?</i>	
Level 0	Tidak terdapat sistem manajemen kepegawaian.			
Level 1	Sistem Manajemen Kepegawaian menyediakan diseminasi (penyebaran satu arah) seperti informasi nomor ID pegawai, riwayat jabatan, riwayat Pendidikan, dan lain sebagainya.			
Level 2	Sistem Manajemen Kepegawaian menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi kepegawaian dan mengunduh dokumen data diri pegawai.			
Level 3	Sistem manajemen kepegawaian menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunduh atau mengunggah informasi, dan sistem dapat memberikan respon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan kenaikan pangkat, pengajuan cuti, dokumen pegawai, dan lain sebagainya.			
Level 4	Sistem Manajemen Kepegawaian menyediakan layanan kolaborasi dimana layanan kepegawaian diintegrasikan dengan suatu layanan SPBE lain seperti layanan disposisi dan korespondensi atau diintegrasikan dengan layanan SPBE lain seperti Badan Kepegawaian Negara (BKN).			
Level 5	Sistem manajemen kepegawaian dapat terus ditingkatkan dengan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.			
Penjelasan :				
Data Pendukung :				



Penjelasan Indikator :

- a) Manajemen Kepegawaian adalah serangkaian proses untuk menghasilkan pengelolaan kepegawaian/PNS yang efektif, efisien, dan berkesinambungan serta berkualitas.
- b) Layanan Manajemen Kepegawaian merupakan tugas atau fungsi yang memberikan manfaat dalam manajemen kepegawaian/PNS untuk Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
- c) Sistem Manajemen Kepegawaian dimaksud adalah suatu layanan manajemen kepegawaian yang berbasis elektronik.

Penjelasan masing-masing tingkat kematangan:

Level 0 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum memiliki sistem manajemen kepegawaian.

Level 1 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki sistem manajemen kepegawaian yang menyediakan layanan diseminasi informasi yang bersifat satu arah ke pengguna layanan seperti informasi nomor NIP pegawai, riwayat jabatan, riwayat pendidikan, dan sebagainya.

Level 2 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Sistem Informasi Kepegawaian namun belum dapat mencatat kinerja pegawai.

Level 3 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Sistem Informasi Kepegawaian yang dapat memberikan layanan transaksi seperti mekanisme persetujuan kenaikan pangkat, proses pengajuan cuti, dan sebagainya.

Level 4 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki sistem manajemen kepegawaian yang menyediakan layanan kolaborasi dimana Sistem Informasi Kepegawaian sudah dapat berkolaborasi/terintegrasi dengan sistem keuangan, naskah dinas elektronik, dan sebagainya.

Level 5 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki sistem manajemen kepegawaian yang dapat ditingkatkan/dikembangkan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.



Data pendukung dapat berupa dokumen penggunaan aplikasi, screenshot layanan aplikasi, daftar layanan dan fitur aplikasi, arsitektur aplikasi, pengelolaan repositori API, unit kerja yang menangani manajemen layanan, dan bukti terkait lainnya. Apabila lebih dari satu file, maka nama file ditambahkan huruf seperti indikator26a.pdf, indikator26b.pdf, indikator26c.pdf, dan seterusnya.



LAMPIRAN H HASIL EVALUASI LAYANAN SPBE INDIKATOR 27 LAYANAN MANAJEMEN PERENCANAAN

Domain 3	Layanan SPBE	Aspek 6	Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	Pilihan Saudara
Indikator 27	Layanan Manajemen Perencanaan	Pertanyaan	<i>Apakah Instansi Saudara memiliki system manajemen perencanaan?</i>	
Level 0	Tidak terdapat sistem manajemen perencanaan.			
Level 1	Sistem manajemen perencanaan menyediakan diseminasi (penyebaran satu arah) seperti informasi jumlah anggaran yang tersedia.			
Level 2	Sistem manajemen perencanaan menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi dan mengunduh dokumen terkait perencanaan kegiatan.			
Level 3	Sistem manajemen perencanaan menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunduh atau mengunggah informasi perencanaan kegiatan, dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan dan validasi perencanaan kegiatan di internal instansi pusat/pemerintah daerah.			
Level 4	Sistem manajemen perencanaan menyediakan layanan kolaborasi dimana layanan perencanaan diintegrasikan dengan suatu layanan seperti layanan manajemen pegawai, layanan manajemen keuangan dan lain sebagainya atau diintegrasikan dengan layanan SPBE instansi pemerintah lain.			
Level 5	Sistem manajemen perencanaan dapat terus ditingkatkan dengan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.			
Penjelasan :				
Data Pendukung :				



Penjelasan Indikator :

- a) Manajemen Perencanaan adalah serangkaian proses untuk menghasilkan pengelolaan perencanaan yang efektif, efisien, dan akuntabel.
- b) Layanan Manajemen Perencanaan merupakan tugas atau fungsi yang memberikan manfaat dalam pengelolaan perencanaan Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
- c) Sistem Manajemen Perencanaan dimaksud adalah suatu layanan manajemen perencanaan berbasis elektronik.

Penjelasan masing-masing tingkat kematangan:

Level 0 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum memiliki sistem manajemen perencanaan.

Level 1 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki sistem manajemen perencanaan yang menyediakan layanan diseminasi informasi yang bersifat satu arah kepada pengguna layanan seperti informasi jumlah perencanaan kegiatan yang tersedia.

Level 2 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki sistem manajemen perencanaan yang menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi dan mengunduh e-dokumen terkait perencanaan kegiatan.

Level 3 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki sistem manajemen perencanaan yang menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunduh atau mengunggah informasi penganggaran, dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan dan validasi perencanaan kegiatan.

Level 4 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah layanan perencanaan yang dapat berkolaborasi dengan aplikasi keuangan dan penilaian kinerja Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah atau aplikasi e-performance based budgeting.

Level 5 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki sistem manajemen perencanaan yang dapat ditingkatkan/dikembangkan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.



Data pendukung dapat berupa dokumen penggunaan aplikasi, screenshot layanan aplikasi, daftar layanan dan fitur aplikasi, arsitektur aplikasi, pengelolaan repositori API, unit kerja yang menangani manajemen layanan, dan bukti terkait lainnya. Apabila lebih dari satu file, maka nama file ditambahkan huruf seperti indikator27a.pdf, indikator27b.pdf, indikator27c.pdf, dan seterusnya.



LAMPIRAN K HASIL EVALUASI LAYANAN SPBE INDIKATOR 28 LAYANAN MANAJEMEN PENGANGGARAN

Domain 3	Layanan SPBE	Aspek 6	Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	Pilihan Saudara
Indikator 28	Layanan Manajemen Penganggaran	Pertanyaan	<i>Apakah Instansi Saudara memiliki system manajemen penganggaran?</i>	
Level 0	Tidak terdapat sistem manajemen penganggaran.			
Level 1	Sistem manajemen penganggaran menyediakan diseminasi (penyebaran satu arah) seperti informasi jumlah anggaran yang tersedia.			
Level 2	Sistem manajemen penganggaran menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi dan mengunduh dokumen terkait penganggaran.			
Level 3	Sistem manajemen penganggaran menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunduh atau mengunggah informasi penganggaran, dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan dan validasi penganggaran di internal instansi pemerintah.			
Level 4	Sistem manajemen penganggaran menyediakan layanan kolaborasi dimana layanan penganggaran diintegrasikan dengan suatu layanan seperti layanan manajemen pegawai, layanan manajemen keuangan dan lain sebagainya atau diintegrasikan dengan layanan SPBE instansi pemerintah lain seperti kementerian keuangan.			
Level 5	Sistem manajemen penganggaran dapat terus ditingkatkan dengan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.			
Penjelasan :				
Data Pendukung :				



Penjelasan Indikator :

- a) Manajemen Penganggaran adalah serangkaian proses untuk menghasilkan pengelolaan penganggaran yang efektif, efisien, dan akuntabel.
- b) Layanan Manajemen Penganggaran merupakan tugas atau fungsi yang memberikan manfaat dalam pengelolaan anggaran Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
- c) Sistem Manajemen Penganggaran dimaksud adalah suatu layanan manajemen penganggaran berbasis elektronik.

Penjelasan masing-masing tingkat kematangan:

Level 0 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum memiliki sistem manajemen penganggaran.

Level 1 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki sistem manajemen penganggaran yang menyediakan layanan diseminasi informasi yang bersifat satu arah kepada pengguna layanan seperti informasi jumlah anggaran yang tersedia.

Level 2 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki sistem manajemen penganggaran yang menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi, mengunduh e-dokumen terkait penganggaran, dan memasukkan usulan anggaran.

Level 3 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki sistem manajemen penganggaran yang menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunduh atau mengunggah informasi penganggaran, dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan dan validasi penganggaran, serta analisis anggaran.

Level 4 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki layanan penganggaran yang dapat berkolaborasi dengan, misalnya, aplikasi perencanaan dan penilaian kinerja Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

Level 5 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki sistem manajemen penganggaran yang dapat ditingkatkan/dikembangkan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.



Data pendukung dapat berupa dokumen penggunaan aplikasi, screenshot layanan aplikasi, daftar layanan dan fitur aplikasi, arsitektur aplikasi, pengelolaan repositori API, unit kerja yang menangani manajemen layanan, dan bukti terkait lainnya. Apabila lebih dari satu file, maka nama file ditambahkan huruf seperti indikator28a.pdf, indikator28b.pdf, indikator28c.pdf, dan seterusnya.



LAMPIRAN N HASIL EVALUASI LAYANAN SPBE INDIKATOR 29 LAYANAN MANAJEMEN KEUANGAN

Domain 3	Layanan SPBE	Aspek 6	Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	Pilihan Saudara
Indikator 29	Layanan Manajemen Keuangan	Pertanyaan	<i>Apakah Instansi Saudara memiliki system manajemen keuangan?</i>	
Level 0	Tidak terdapat sistem manajemen keuangan.			
Level 1	Sistem manajemen keuangan menyediakan diseminasi (penyebaran satu arah) seperti informasi administrasi keuangan.			
Level 2	Sistem manajemen keuangan menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi, mengunduh dokumen terkait keuangan, dan memasukkan data keuangan.			
Level 3	Sistem manajemen keuangan menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunduh atau mengunggah informasi terkait keuangan, dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan dari atasan dan validasi keuangan di internal instansi pusat/pemerintah daerah.			
Level 4	Sistem manajemen keuangan menyediakan layanan kolaborasi dimana layanan keuangan diintegrasikan dengan suatu layanan seperti layanan manajemen kepegawaian, layanan manajemen penganggaran dan layanan kinerja elektronik atau diintegrasikan dengan layanan SPBE instansi pemerintah lain seperti kementerian keuangan.			
Level 5	Sistem manajemen keuangan dapat terus ditingkatkan dengan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.			
Penjelasan :				
Data Pendukung :				



Penjelasan Indikator :

- a) Manajemen Keuangan adalah serangkaian proses untuk menghasilkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, dan akuntabel.
- b) Layanan Manajemen Keuangan merupakan tugas atau fungsi yang memberikan manfaat dalam pengelolaan keuangan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
- c) Sistem Manajemen Keuangan dimaksud adalah suatu layanan manajemen keuangan berbasis elektronik.

Penjelasan masing-masing tingkat kematangan:

Level 0 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum memiliki sistem manajemen keuangan.

Level 1 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki sistem manajemen keuangan yang menyediakan layanan diseminasi informasi bersifat satu arah kepada pengguna layanan seperti informasi administrasi keuangan, laporan keuangan.

Level 2 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki sistem manajemen keuangan yang menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi dan mengunduh e-dokumen terkait administrasi keuangan, memasukkan data keuangan, dan informasi dashboard.

Level 3 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki sistem manajemen keuangan yang menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunduh atau mengunggah informasi keuangan, dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan dan validasi keuangan, dan analisis keuangan.

Level 4 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki layanan keuangan yang dapat berkolaborasi dengan aplikasi layanan lain seperti layanan pengadaan barang/jasa atau aplikasi Barang Milik Negara.

Level 5 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki sistem manajemen keuangan yang dapat ditingkatkan/dikembangkan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.



Data pendukung dapat berupa dokumen penggunaan aplikasi, screenshot layanan aplikasi, daftar layanan dan fitur aplikasi, arsitektur aplikasi, pengelolaan repositori API, unit kerja yang menangani manajemen layanan, dan bukti terkait lainnya. Apabila lebih dari satu file, maka nama file ditambahkan huruf seperti indikator29a.pdf, indikator29b.pdf, indikator29c.pdf, dan seterusnya.



LAMPIRAN Q HASIL EVALUASI LAYANAN SPBE INDIKATOR 30 LAYANAN MANAJEMEN KINERJA

Domain 3	Layanan SPBE	Aspek 6	Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	Pilihan Saudara
Indikator 30	Layanan Manajemen Kinerja	Pertanyaan	<i>Apakah Instansi Saudara memiliki system manajemen kinerja?</i>	
Level 0	Tidak terdapat sistem manajemen kinerja.			
Level 1	Sistem manajemen kinerja menyediakan diseminasi (penyebaran satu arah) seperti indikator dan target kinerja.			
Level 2	Sistem manajemen kinerja menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi dan mengunggah kemajuan kinerja dan menampilkan rasio (persentasi) kemajuan kinerja.			
Level 3	Sistem manajemen kinerja menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunduh atau mengunggah informasi terkait kinerja, dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan kinerja unit organisasi dari atasan dan validasi kinerja di internal instansi pusat/pemerintah daerah.			
Level 4	Sistem manajemen kinerja menyediakan layanan kolaborasi yang diintegrasikan dengan layanan SPBE lainnya seperti layanan manajemen penganggaran, layanan Monev, RKPD, e-Musreimbang, dan sebagainya.			
Level 5	Sistem manajemen kinerja dapat terus ditingkatkan dengan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.			
Penjelasan :				
Data Pendukung :				



Penjelasan Indikator :

- a) Manajemen Kinerja adalah serangkaian proses untuk memastikan bahwa sasaran organisasi telah dicapai secara konsisten dalam cara-cara yang efektif dan efisien.
- b) Layanan Manajemen Kinerja merupakan tugas atau fungsi yang memberikan manfaat dalam pencapaian sasaran Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
- c) Sistem Manajemen Kinerja dimaksud adalah suatu layanan manajemen kinerja berbasis elektronik.

Penjelasan masing-masing tingkat kematangan:

Level 0 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum memiliki sistem manajemen kinerja.

Level 1 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki sistem manajemen kinerja yang menyediakan layanan diseminasi informasi yang bersifat satu arah seperti indikator dan target kinerja organisasi.

Level 2 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki sistem manajemen kinerja yang menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi dan mengunggah kemajuan kinerja, menampilkan rasio kemajuan kinerja, menampilkan dashboard kinerja.

Level 3 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki sistem manajemen kinerja yang menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunduh atau mengunggah informasi terkait kinerja, dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan kinerja organisasi dari atasan dan validasi kinerja.

Level 4 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki layanan kinerja yang dapat berkolaborasi dengan layanan SPBE lain seperti aplikasi perencanaan dan penganggaran Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Level 5 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki sistem manajemen kinerja yang dapat ditingkatkan/dikembangkan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.



Data pendukung dapat berupa dokumen penggunaan aplikasi, screenshot layanan aplikasi, daftar layanan dan fitur aplikasi, arsitektur aplikasi, pengelolaan repositori API, unit kerja yang menangani manajemen layanan, dan bukti terkait lainnya. Apabila lebih dari satu file, maka nama file ditambahkan huruf seperti indikator30a.pdf, indikator30b.pdf, indikator30c.pdf, dan seterusnya.



LAMPIRAN T HASIL EVALUASI LAYANAN SPBE INDIKATOR 31 LAYANAN PENGADAAN

Domain 3	Layanan SPBE	Aspek 6	Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	Pilihan Saudara
Indikator 31	Layanan Pengadaan	Pertanyaan	<i>Apakah Instansi Saudara memiliki sistem pengadaan secara elektronik?</i>	
Level 0	Tidak terdapat sistem pengadaan secara elektronik.			
Level 1	Sistem pengadaan secara elektronik menyediakan diseminasi (penyebaran satu arah) seperti informasi daftar lelang barang dan jasa yang dibutuhkan oleh instansi.			
Level 2	Sistem pengadaan secara elektronik menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi, mengunduh dan mengunggah dokumen, dan memasukkan data terkait pengadaan.			
Level 3	Sistem pengadaan secara elektronik menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunduh atau mengunggah informasi terkait pengadaan, dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan dan validasi pada alur proses pengadaan, verifikasi penyedia.			
Level 4	Sistem pengadaan secara elektronik menyediakan layanan kolaborasi dimana layanan pengadaan secara elektronik diintegrasikan dengan suatu layanan seperti layanan manajemen penganggaran dan layanan keuangan atau diintegrasikan dengan layanan SPBE instansi pemerintah lainnya.			
Level 5	Sistem pengadaan secara elektronik dapat terus ditingkatkan dengan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.			
Penjelasan :				
Data Pendukung :				



Penjelasan Indikator :

- a) Pengadaan adalah serangkaian proses pemenuhan atau penyediaan kebutuhan dan pasokan barang atau jasa di bawah kontrak atau pembelian langsung untuk memenuhi kebutuhan Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah.
- b) Layanan Pengadaan merupakan tugas atau fungsi yang memberikan manfaat dalam pengadaan barang dan jasa Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
- c) Sistem Pengadaan Secara Elektronik dimaksud adalah Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang memenuhi prinsip pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Penjelasan masing-masing tingkat kematangan:

Level 0 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum memiliki sistem pengadaan secara elektronik.

Level 1 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki sistem pengadaan secara elektronik yang menyediakan layanan diseminasi/penyebaran satu arah informasi seperti informasi daftar lelang barang dan jasa yang dibutuhkan.

Level 2 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki sistem pengadaan secara elektronik yang menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi, mengunduh dan mengunggah dokumen terkait pengadaan.

Level 3 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki sistem pengadaan secara elektronik yang menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunduh atau mengunggah informasi terkait pengadaan, dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan dan validasi pada alur proses pengadaan.

Level 4 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki layanan pengadaan sudah dapat diintegrasikan secara horizontal ke layanan SPBE lainnya seperti layanan manajemen anggaran atau diintegrasikan dengan layanan SPBE instansi pemerintah lainnya.

Level 5 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki sistem pengadaan secara elektronik yang dapat ditingkatkan/dikembangkan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.



Data pendukung dapat berupa dokumen penggunaan aplikasi, screenshot layanan aplikasi, daftar layanan dan fitur aplikasi, arsitektur aplikasi, pengelolaan repositori API, unit kerja yang menangani manajemen layanan, dan bukti terkait lainnya. Apabila lebih dari satu file, maka nama file ditambahkan huruf seperti indikator31a.pdf, indikator31b.pdf, indikator31c.pdf, dan seterusnya.